

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN  
TUBAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMANDING  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Kecamatan Semanding khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5(lima) tahun kedepan.

Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar,yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Semanding Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten tuban.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Semanding, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

#### 1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Semanding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Tuban.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Review Renstra OPD Kecamatan Semanding Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

##### *BAB I. PENDAHULUAN*

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

###### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

##### *BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH*

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

###### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### *BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH*

#### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan=permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah (Tabel T-B. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu dan hasil penentuan isu—isu strategis tersebut. Dengan demikian, Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## *BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN*

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### *BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN*

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### *BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN*

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### *BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN*

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

#### *BAB VIII PENUTUP*

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan organisasi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
  - k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  - l. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

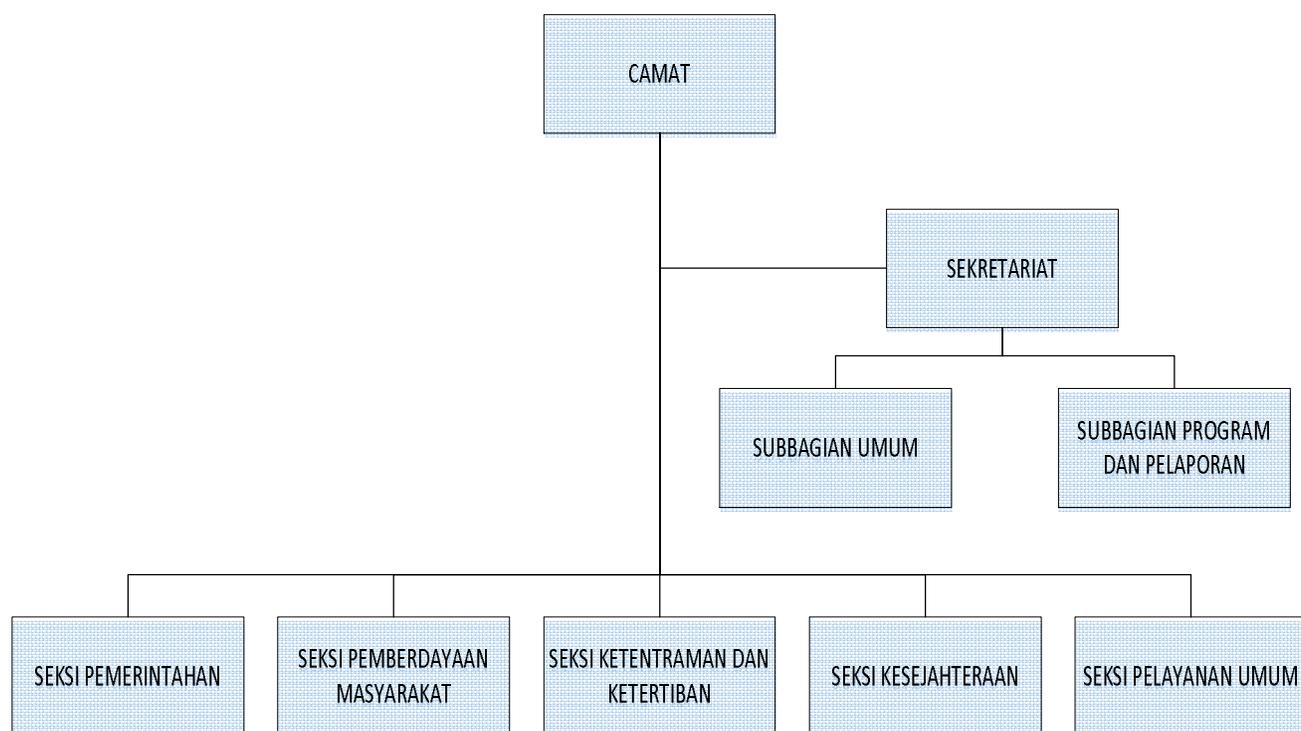
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

### 2.1.3. Struktur Organisasi :

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Semanding adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN TUBAN**



### 2.2. Sumber Daya OPD

Sumberdaya yang dimiliki di Kecamatan Semanding dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi semua sumberdaya yang ada di Kantor Kecamatan dan 2 Kelurahan serta 15 Desa meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal). Secara rinci sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Kecamatan Semanding termasuk 2 Kelurahan sampai dengan Desember 2016 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang. Rincian jumlah pegawai Kecamatan Semanding Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

##### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	42
2	Tenaga Honorer (K2)	0
3	Tenaga Honorer tidak masuk ( Ki)	0
4	Tenaga Sukwan (K2)	0
5	Tenaga Sukwan (tidak masuk K2)	10
	Jumlah	52

## b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Pasca Sarjana	3	4,5 %
2	Sarjana	18	28,79 %
3	Sarjana Muda	0	0 %
3	SLTA	31	66,66 %
4	SLTP	0	0 %
5	SD	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	

## c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk.1	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	8
4	Penata	III/c	5
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tingkat I	II/d	4
8	Pengatur	II/c	13
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	5
10	Pengatur Muda	II/a	0
11	Juru Tingkat I	I/d	0
12	Juru	I/c	0
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
14	Juru Muda	I/a	0
	<b>Jumlah</b>		<b>42</b>

## d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	16	-
2	Fungsional	0	-
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	-

## e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-Laki	35	77,27 %
2	Perempuan	17	22,73 %
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	-

## f. Formasi Karyawan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1	Kantor Kecamatan Semanding	23	0	14	7	2
2	Kelurahan Gedongombo	12	0	7	5	0
3	Kelurahan Karang	7	0	1	6	0
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>2</b>

**2.2.2. Perlengkapan**

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di Kecamatan Semanding sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	BANYAKNYA	SATUAN
1	Gedung kantor	3	Unit
2	Rumah dinas Camat	1	Unit
3	Pendopo	3	Unit
4	Panti PKK	1	Unit
5	Mushola	2	Unit
6	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Buah
7	Kendaraan roda 2 (dua)	48	Buah
8	Mesin Ketik	2	Buah
9	Personal Komputer	8	Unit
10	Meja kerja	55	Buah
11	Kursi kerja	54	Buah
12	Meja rapat	24	Buah
13	Pesawat telepon	2	Buah
14	Pesawat HT	1	Buah
15	Felling Cabinet	4	Buah
16	Almari	17	Buah
17	Telpon fax	1	Buah
18	Meja Podium	3	Buah

## 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

### 2.3.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kecamatan Semanding tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
4. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan peningkatan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan.

Kinerja sasaran ini rata - rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Semanding menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2011 - 2015		PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukungna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	100 %	100 %	100 %

Dari 7 (tujuh) indikator tersebut nampak bahwa 7 (tujuh) indikator berhasil mencapai 100 %.

Selanjutnya kinerja anggaran dan realisasinya dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Semanding Tahun 2011 – 2015

<b>Tahun Ke</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio antara Realisasi dan Anggaran</b>
1	2.553.431.578,00	2.450.488.354,00	95,97%
2	2.916.384.880,00	2.822.053.099,00	96,77%
3	3.321.103.990,00	3.088.023.181,84	92,98%
4	3.750.314.240,43	3.437.660.088,00	91,66%
5	3.848.116.829,00	3.614.312.997,16	93,92%
Rata-Rata	3.277.870.303,49	3.082.507.544,00	94,26%

Sumber data : DPA-DPPA SKPD Kec Semanding

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada kurun waktu 2011 – 2015 tercapai cukup baik dengan rata-rata sebesar 94,26%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pembangunan anggaran yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,74%. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut antara lain adalah proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang :

1. Beragam masalah dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektorsehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan. Hal tersebut telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapannya kedepan dinas instansi tingkat Kabupatendalam pelaksanaan program dan kegiatan memprioritaskan pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.

2. PBB diharapkan online, serta diberikan peta blok untuk kecamatan di masing-masing Desa, usulan perubahan mutasi kalau bisa tepat waktu, begitu juga untuk penyampaian SPPT ke Kecamatan.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dengan indikator masih lemahnya administrasi desa/kelurahan terkait pembuatan APBDesa, RPJM Desa/Kelurahan, Monografi, SPJ ADD/DD dan lain sebagainya. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Kedepan tentu persoalan ini akan menjadi prioritas dengan memanfaatkan program dan kegiatan yang telah ada yaitu Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Belum optimalnya kinerja Aparatur Pemerintahan mengingat kondisi bangunan gedung kantor yang kurang representatif yakni terbatasnya ruangan/sempit dan bocor pada waktu hujan sehingga perlu rehab berat kantor. Diharapkan dengan rehab berat, ditambahkan ruangan untuk berkantor PKH, Pendamping Desa, PKK, Sekretariat UKS, Sekretariat Pokjantal Kabupaten sehat, ruang rapat kantor dan ruang Pelayanan Publik yang lebih representatif.

5. Persoalan sosial di Kecamatan Semanding cukup banyak antara lain : produsen arak terbesar, maraknya peredaran dan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, perjudian, angka kecelakaan tertinggi di Kabupaten Tuban, tingginya angka kemiskinan, tingginya kriminalitas yang perlu koordinasi lebih intensif dengan stakeholder terkait. Untuk optimalisasi penanganan perlu pembentukan satgas – satgas agar penanganan bisa berjalan lebih efektif.

6. Potensi alam dan wilayah sangat menjanjikan tetapi belum tergarap secara optimal sehingga butuh koordinasi, fasilitasi, pendampingan kepada desa agar potensi wilayah yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang berkualitas, bersih, dan transparan. Oleh karenanya perlu upaya untuk terus meningkatkan pelayanan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kondisi tempat pelayanan didapatkan dari hasil observasi langsung di tempat pelayanan publik Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan hasilnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

## Kondisi Tempat Pelayanan di Kecamatan Semanding

No	Fasilitas	Kondisi
1	Loket Khusus Pelayanan	Ada, Kondisinya cukup
2	Ruang tunggu	Ada, Kondisinya cukup
3	Kapasitas ruang tunggu	15 orang
4	Pendingin ruangan (AC/kipas angin)	Ada, Kondisinya cukup
5	Pengeras suara	Tidak ada
6	Sistem nomor antrian	Tidak Ada
7	TV di ruang tunggu	Ada
8	Pengumuman/informasi tentang prosedur pengurusan layanan(SOP)	Ada
9	Pengumuman/informasi tentang PERSYARATAN pengurusan layanan	Ada
10	Pengumuman/informasi tentang BIAYA pengurusan layanan	Ada
11	Pengumuman/informasi tentang LAMA WAKTU PENYELESAIAN pengurusan layanan	Ada
12	Kotak pengaduan/saran	Ada, kondisinya cukup
13	Tempat parker	Ada, kondisinya cukup
14	Toilet untuk pengguna layanan	Ada

15	Jenis toilet untuk pengguna layanan	
	a. Toilet laki-laki	Ada
	b. Toilet perempuan	Ada
16	Fasilitas toilet	
	a. Kloset duduk/jongkok	Ada, kondisinya cukup
	b. Tempat air	Ada, kondisinya baik
	c. Gayung	Ada, kondisinya baik
	d. Kran	Ada, kondisinya baik
	e. Tempat sampah	Ada, kondisinya cukup
	f. Urinal	Ada, kondisinya cukup
	g. Wastafel	Ada, kondisinya cukup
	h. Cermin	Ada, kondisinya cukup
	i. Penanda toilet	Ada, kondisinya baik
17	Ruang khusus merokok	Ada
	a. Tempat duduk	Ada
	b. Meja	Ada
	c. Alat penghisap udara/sirkulasi udara	Ada
	d. Penanda R. Smoking Area	Ada
18	Fasilitas R. Pojok Asi	Tidak ada
	a. Kursi	Tidak ada
	b. Meja	Tidak ada
	c. Westafel	Tidak ada
	d. Sabun cuci tangan	Tidak ada
	e. Penanda pojok ASI	Tidak ada
19	Spanduk/stiker/banner/dll yang berisi larangan suap/korupsi/KKN	Ada
20	Spanduk/banner/dll yang berisis Visi & Misi Kecamatan	Ada

Terdapat beberapa fasilitas yang kondisinya sudah baik dan memadai seperti loket, pendingin ruangan, dan ruang khusus merokok. Namun

beberapa fasilitas penting lainnya justru belum tersediadiantaranya pengeras suara, sistem nomer antrian, pengumuman/informasi tentang biaya pengurusan layanan, pengumuman/informasi tentang lama waktu penyelesaian pengurusan layanan, dan ruang khusus menyusui.

Berikut ini adalah kondisi riil dari tempat pelayanan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban:



**Gambar 2.1**  
**Tampak Depan Kecamatan Semanding**



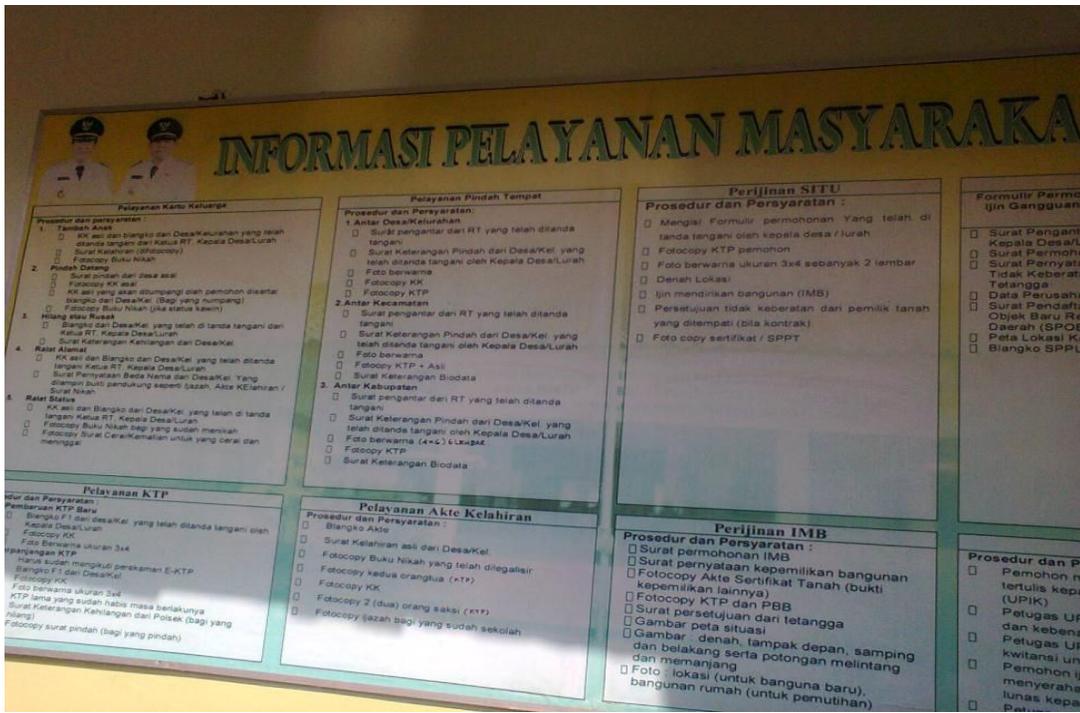
**Gambar 2.2**  
**Loket Khusus Pelayanan di Kecamatan Semanding**

- Ruang tunggu pelayanan



**Gambar 2.3**  
**Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Semanding**

- Pengumuman/informasi tentang pelayanan



**Gambar 2.4**  
Informasi Tentang Jenis Layanan di Kecamatan Semanding



**Gambar 2.5**  
Informasi Tentang Prosedur/Tahapan Pengurusan Layanan di Kecamatan Semanding



**Gambar 2.6**  
**Informasi Tentang Visi Misidi Kecamatan Semanding**

- Tempat parkir



**Gambar 2.7**  
**Tempat Parkir Kendaraan di Kecamatan Semanding**

- Toilet



**Gambar 2.8**  
**Toilet di Kecamatan Semanding**

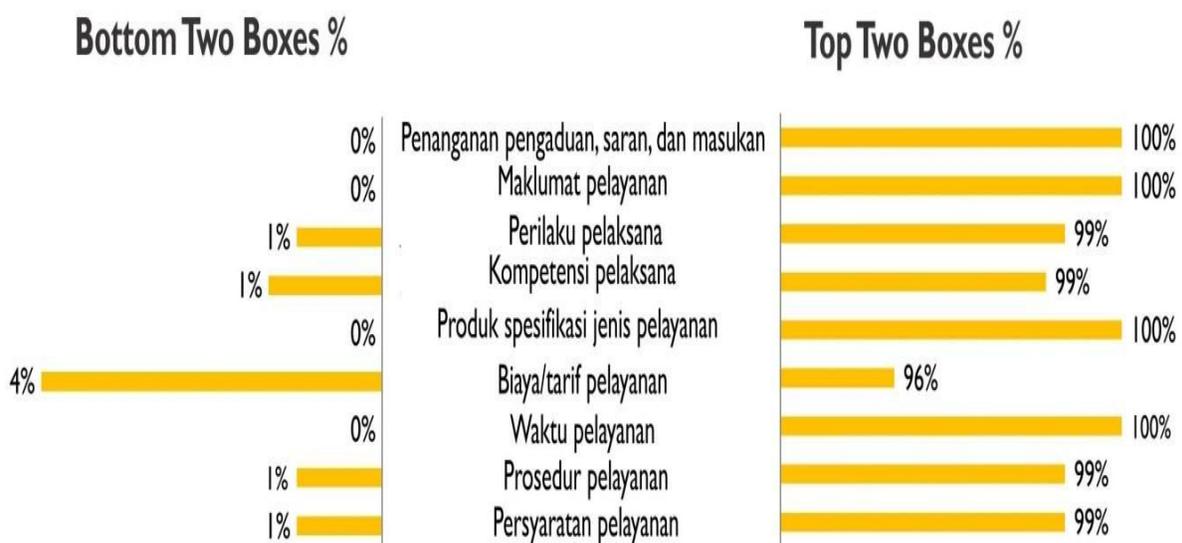
- Kotak Pengaduan/saran



**Gambar 2.9**  
**Kotak Pengaduan/Saran di Kecamatan Semanding**

Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang didasarkan pada 18 sub indikator penilaian. Pada Gambar 3.0 Top Two Boxes menunjukkan persentase responden yang menjawab dalam “puas “ (memilih jawaban 4 dan 5) dan Bottom Two Boxes menunjukkan persentase responden yang menjawab “tidak puas” (Memilih jawaban 1 dan 2) pada setiap indikator penilaian layanan di kecamatan semanding. Indikator yang memiliki persentase Top Two Boxes paling besar adalah Maklumat pelayanan, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, produksi spesifikasi jenis pelayanan, dan Waktu pelayanan sebesar 100 % responden.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase Bottom Two Boxes paling besar adalah Biaya/tarif Pelayanan sebesar 4 % responden. Menurut responden, jangka biaya/tarif yang diperlukan untuk menyelesaikan layanan seperti untuk mengurus surat pindah, Balik Nama Surat Tanah, dan pengurusan SKTM masih belum efisien dalam penyelesaiannya. Persentase jawaban responden dapat dilihat pada gambar 3.0



**Gambar 3.0**  
**Persentase Jawaban Responden Kecamatan Semanding – 9 Indikator**

Sedangkan pada tabel 3.1 persentase responden yang menjawab puas dan tidak puas pada setiap sub indikator penilaian. Sub indikator yang memiliki persentase Top Two Boxes paling besar adalah Persyaratan pengurusan layanan, Prosedur pelayanan, Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan, Kecapatan pelayanan, Variasi atau kelengkapan jenis layanan, Kemampuan petugas dalam melayani, Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani, dan Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan selama mengurus layanan sebesar 100 % responden.

Sedangkan sub indikator yang memiliki persentase Bottom Two Boxes paling besar adalah Kewajaran biaya sebesar 6 % responden. Sedangkan sub indikator yang memiliki persentase Bottom Two Boxes paling kecil adalah sub indikator yang memiliki nilai Top Two Boxes paling besar. Namun, jika persentase Top Two Boxes paling besar tidak serta merta nilai SKM nya menjadi paling tinggi, karena nilai SKM diperoleh dari rata-rata tertimbang.

Tabel 3.1  
Persentase Jawaban Responden  
Kecamatan Semanding – 18 Indikator

<b>Sub Indikator Pelayanan</b>	<b>Bottom two boxes %</b>	<b>Top two boxes %</b>
Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	2 %	98 %
Persyaratan pengurusan layanan	0 %	100 %
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	2 %	98 %
Prosedur Pelayanan	0 %	100 %
Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	0 %	100 %
Kecepatan Pelayanan	0 %	100 %
Transparansi biaya pengurusan layanan	4 %	96 %
Kewajaran biaya	6 %	94 %
Kesesuaian antara biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan	2 %	98 %
Variasi atau kelengkapan jenis layanan	0 %	100 %
Kesesuaian pelayanan yang dibutuhkan	0 %	100 %
Prosedur Pelayanan	0 %	100 %
Kedisiplinan petugas dalam melayani	4 %	96 %
Tanggung jawab petugas dalam melayani	0 %	100 %
Kemampuan petugas dalam melayani	0 %	100 %
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	0 %	100 %
Keadilan petugas dalam melayani	2 %	98 %
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	0 %	100 %
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan selama mengurus layanan	0 %	100 %

Nilai IKM Kecamatan Semanding Tahun 2018 diperoleh sebesar 83,89, nilai tersebut masuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja Baik. Dari 9 indikator penilaian, nilai SKM berada pada rentang 74,67 hingga 85,25 yang tergolong dalam kategori B dan A yaitu dengan kinerja Baik dan “Sangat baik”. Sedangkan Indikator yang memiliki nilai SKM terendah adalah Kompetensi Pelaksana dengan nilai SKM sebesar 74,67 dan termasuk dalam kategori kinerja “ Baik “. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2  
IKM di Kecamatan Semanding – 9 Indikator

Indikator Pelayanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Persyaratan Pelayanan	80,97	B	Baik
Prosedur Pelayanan	80,19	B	Baik
Waktu Pelayanan	81,67	B	Baik
Biaya/tarif Pelayanan	100	A	Sangat Baik
Prosedur spesifikasi jenis pelayanan	81,39	B	Baik
Kompetensi pelaksana	81,18	B	Baik
Perilaku Pelaksana	81,30	B	Baik
Maklumat Pelayanan	78,50	B	Baik
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	89,82	A	Sangat Baik
<b>Kecamatan Semanding</b>	<b>83,89</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Pada Tabel 3.3 ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Semanding dan 18 indikator penyusunnya. Nilai IKM Kecamatan Semanding Tahun 2018 diperoleh sebesar 83,89, nilai tersebut masuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja Baik. Dari 18 sub indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 74 hingga 96. Terdapat 2 sub indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Persyaratan pengurusan layanan dan Kesesuaian antara biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan. Sub indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kedisiplinan petugas dalam melayani sebesar 74, hal tersebut mengindikasikan bahwa anatar tanggung jawab petugas dalam melayani masih kurang.

**Tabel 3.3**  
IKM di Kecamatan Semanding – 18 Sub Indikator

<b>Indikator Pelayanan</b>	<b>SKM</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>Kinerja</b>
Persyaratan pengurusan layanan	80,97	B	Baik
Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	83,33	B	Baik
Kesesuain antara persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	80,68	B	Baik
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	78,89	B	Baik
Prosedur Pelayanan	80,19	B	Baik
Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	79,44	B	Baik
Kecepatan Pelayanan	83,89	B	Baik
Transparansi biaya pengurusan layanan	100	A	Sangat Baik
Kewajaran biaya	100	A	Sangat Baik
Variasi atau kelengkapan jenis layanan	81,39	B	Baik
Kesesuaian pelayanan yang dibutuhkan	81,11	B	Baik
Kedisiplinan petugas dalam melayani	81,67	B	Baik
Tanggung jawab petugas dalam melayani	81,67	B	Baik
Kemampuan petugas dalam melayani	75	B	Baik
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	75	B	Baik
Keadilan petugas dalam melayani	74,5	B	Baik
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	75,5	B	Baik
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan selama mengurus layanan	75,5	B	Baik
<b>Kecamatan Semanding</b>	<b>77,17</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Nilai IKM Kecamatan Semanding Tahun 2016 diperoleh sebesar 77,17, nilai tersebut masuk dalam mutu Pelayanan kagori B dengan katagori kinerja Baik. Dari 9 indikator Penilaian, nilai IKM berada pada rentang 74,67 hingga 85,25 yang tergolong dalam katagori B dan A yaitu dengan kinerja Baik dan sangat Baik. Indikator yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Persyaratan Pelayanan dengan nilai IKM sebesar 85,25 dan termasuk dalam katagori Kinerja “Sangat Baik”. Sedangkan indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah kopetensui pelaksana dengan nilai IKM sebesar 74,67 dan

termasuk dalam katagori Kinerja “Baik”. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 5.3  
IKM di Kecamatan Semanding 9 indikator

Indikator Pelayanan	SKM hasil konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
Persyaratan pelayanan	85,25	A	Sangat Baik
Prosedur pelayanan	75,5	B	Baik
Waktu pelayanan	75	B	Baik
Biaya/tarif pelayanan	81	B	Baik
Produk spesifikasi jenis pelayanan	75	B	Baik
Kopetensi pelaksana	74,67	B	Baik
Prilaku pelaksana	74,75	B	Baik
Maklumat pelayanan	75,5	B	Baik
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	75,5	B	Baik
<b>Kecamatan Semanding</b>	<b>77,17</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Pada tabel 5.4 ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Semanding dan 18 sub indikator penyusunnya. Nilai IKM Kecamatan Semanding Tahun 2016 diperoleh sebesar 77,17, nilai tersebut masuk dalam mutu pelayanan katagori B yaitu katagori Kinerja Baik. Dari 18 sub indikator penilaian, nilai IKM berada pada pada rentang 74 hingga 96. Terdapat 2 sub indikator yang dinilai memiliki Kinerja sangat baik yaitu persyaratan pengurusan pelayanan dan Kesesuaian antara Biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan. Sub indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kedisiplinan petugas dalam melayani sebesar 74, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara tanggung jawab petugas dalam melayani masih kurang.

**Tabel 3.3**  
SKM di Kecamatan Semanding – 18 Sub Indikator

Indikator Pelayanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Persyaratan pengurusan layanan	96	A	Sangat Baik
Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	87,5	A	Sangat Baik
Kesesuain antara persyaratan pelayanan	74,5	B	Baik

dengan jenis layanan			
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	75	B	Baik
Prosedur Pelayanan	76	B	Baik
Ketepatan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	75	B	Baik
Kecepatan Pelayanan	75	B	Baik
Transparansi biaya pengurusan layanan	77,5	B	Baik
Kewajaran biaya	78	B	Baik
Variasi atau kelengkapan jenis layanan	75	B	Baik
Kesesuaian pelayanan yang dibutuhkan	75	B	Baik
Kedisiplinan petugas dalam melayani	74	B	Baik
Tanggung jawab petugas dalam melayani	75	B	Baik
Kemampuan petugas dalam melayani	75	B	Baik
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	75	B	Baik
Keadilan petugas dalam melayani	74,5	B	Baik
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	75,5	B	Baik
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan selama mengurus layanan	75,5	B	Baik
<b>Kecamatan semanding</b>	<b>83,89</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Gambar 5.2 adalah IKM Kecamatan Semanding menurut tingkat pendidikan responden. Ditunjukkan bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi pendidikan responden membuatnya semakin kritis, dan hal itulah yang menjadi latar belakang nilai IKM semakin rendah seiring dengan semakin tingginya pendidikan. Nilai IKM responden berpendidikan SLTA sebesar 83,89 adalah yang paling tinggi sekaligus lebih tinggi dibanding IKM Kecamatan Semanding secara keseluruhan (77,17). Sedangkan IKM responden berpendidikan dibawah SLTA sebesar 76,85 dan IKM paling rendah diperoleh pengguna layanan berpendidikan diatas SLTA 76,39.

Demikian pula ditunjukkan pada Gambar 5.3, bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi status ekonomi sosial (SES) responden membuatnya semakin kritis, dan hal itulah yang menjadi latar belakang nilai IKM semakin rendah seiring dengan semakin tingginya SES. Responden dikatakan memiliki status ekonomi atas jika responden mempunyai

pengeluaran sebesar diatas Rp. 6 juta per bulan. Untuk responden dikatakan memiliki status ekonomi menengah jika responden mempunyai pengeluaran sebesar Rp. 2,4 juta sampai Rp. 6 juta per bulan, sedangkan responden dikatakan memiliki status ekonomi bawah jika responden mempunyai pengeluaran dibawah Rp. 2,4 juta per bulan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka nilai IKM responden dengan SES bawah adalah 77,13. Jika dibandingkan dengan IKM pengguna layanan SES menengah yang lebih tinggi dari pada SES bawah sebesar 77,78. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.3



**Gambar 5.3**  
**IKM Kecamatan Semanding Menurut Tingkat SES**

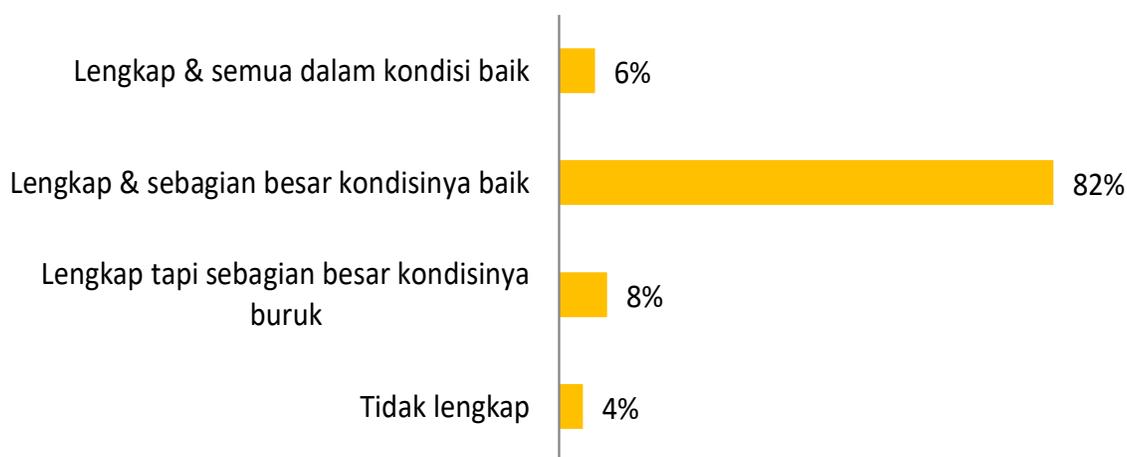
#### INDIKATOR PENILAIAN TAMBAHAN

Pada survei dalam rangka Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016, penilaian tidak hanya terhadap tingkat kepuasan layanan melainkan juga menilai beberapa indikator tambahan diantaranya:

- Sarana, prasarana, dan atau fasilitas di tempat layanan;
- Sistem informasi pelayanan;
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- Jumlah petugas layanan;
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- Komparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Semanding dengan pelayanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban.

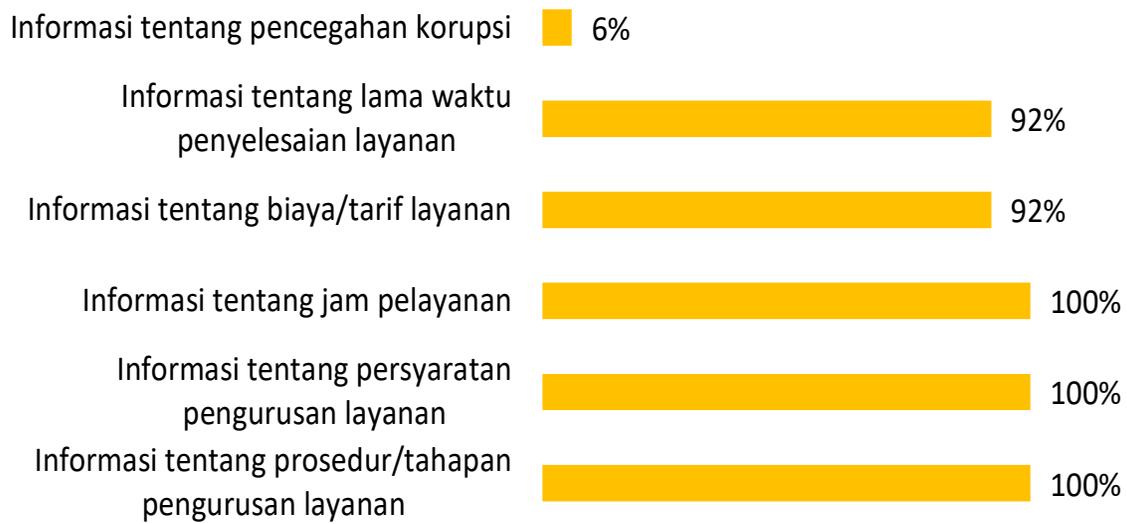
**Pertama**, tentang fasilitas di tempat layanan (Gambar 5.4). Sebagian besar responden (**82%**) menilai bahwa fasilitas di Kecamatan Semanding sudah lengkap dan sebagian besar dalam kondisi baik. Namun demikian, ada(**8 %**) responden menyatakan fasilitas sudah lengkap tapi sebagian besar

kondisinya perlu diperbaiki. Sehingga diperlukan perbaikan atau perawatan pada fasilitas yang sudah ada agar dapat digunakan oleh masyarakat yang sedang melakukan pelayanan di Kecamatan Semanding. Serta terdapat 4 % responden yang mengatakan pelayanan tidak lengkap. Fasilitas yang dinilai kondisinya buruk yaitu kondisi toilet kurang bersih, kran Air yang rusak, dan komputer yang sering eror. Sedangkan untuk fasilitas yang belum ada atau perlu ditambahkan di Kecamatan Semanding yaitu ruang smoking area, ruang Pojok ASI, tempat foto copy, pendingin ruangan seperti AC/Kipas Angin di ruang tunggu, fasilitas cermin, nomor urut antrian, dan TV.



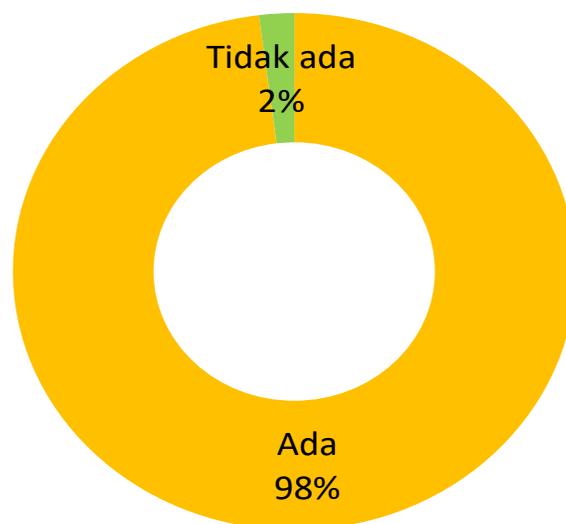
**Gambar 5.4**  
**Kelengkapan & Kondisi Fasilitas di Tempat Pelayanan Kecamatan Semanding**

Kedua, tentang informasi layanan (Gambar 5.5). Salah satu bentuk transparansi layanan publik ditandai dengan keterbukaan informasi. Informasi terkait layanan seperti tentang prosedur/tahapan, persyaratan, pencegahan korupsi, jam pelayanan, biaya/tarif, dan lama waktu penyelesaian layanan sudah seharusnya disampaikan secara terbuka oleh Kecamatan Semanding agar masyarakat pengguna layanan paham terhadap proses dan menghindari penyalahgunaan sekaligus menjaga integritas layanan. Beberapa informasi terkait pelayanan di Kecamatan Semanding diketahui keberadaannya oleh responden. Informasi yang paling banyak dilihat responden adalah tentang prosedur/tahapan pengurusan layanan, informasi tentang persyaratan pengurusan layanan, dan informasi tentang jam pelayanan (100%). Sedangkan informasi yang keberadaannya tidak banyak dilihat oleh responden di Kecamatan Semanding yaitu informasi tentang pencegahan korupsi.



**Gambar 5.5**  
**Kelengkapan Informasi di Kecamatan Semanding**

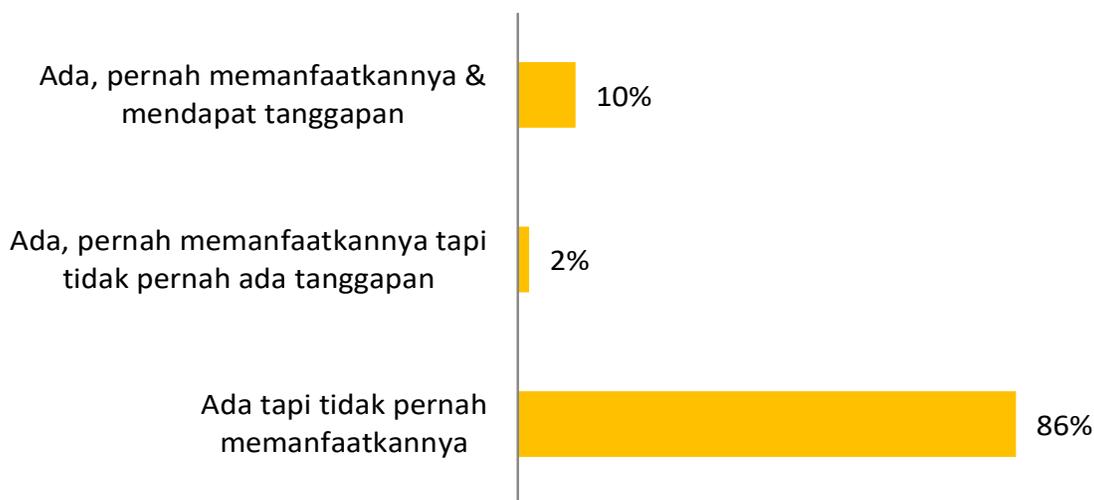
Ketiga, tentang kotak pengaduan/saran (Gambar 5.6). Kotak pengaduan/saran adalah salah satu fasilitas yang diharapkan dapat menjaring pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan layanan yang diperoleh demi perbaikan layanan. Mekanisme pengaduan masyarakat ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi pada layanan publik. Pada gambar 5.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (98 %) mengetahui keberadaan kotak pengaduan/saran. Akan tetapi hanya sebesar 12 % responden yang pernah memanfaatkan fasilitas pengaduan/saran yang sudah tersedia di Kecamatan.



**Gambar 5.6**  
**Fasilitas Kotak Pengaduan/Saran di Kecamatan Semanding**

Dari sebagian besar responden yang mengetahui adanya fasilitas kotak pengaduan/saran di Kecamatan semanding, terdapat 86 % responden yang tidak pernah memanfaatkan, Sedangkan untuk responden yang pernah memanfaatkan kotak pengaduan/saran dan tidak mendapatkan tanggapan oleh Kecamatan Semanding ada 2 % responden. Hanya sebesar 10 %

responden yang pernah memanfaatkan korak pengaduan/saran dan mendapat tanggapan. Berikut gambar yang menunjukkan persentase dari responden yang mengetahui adanya fasilitas kotak pengaduan/saran.



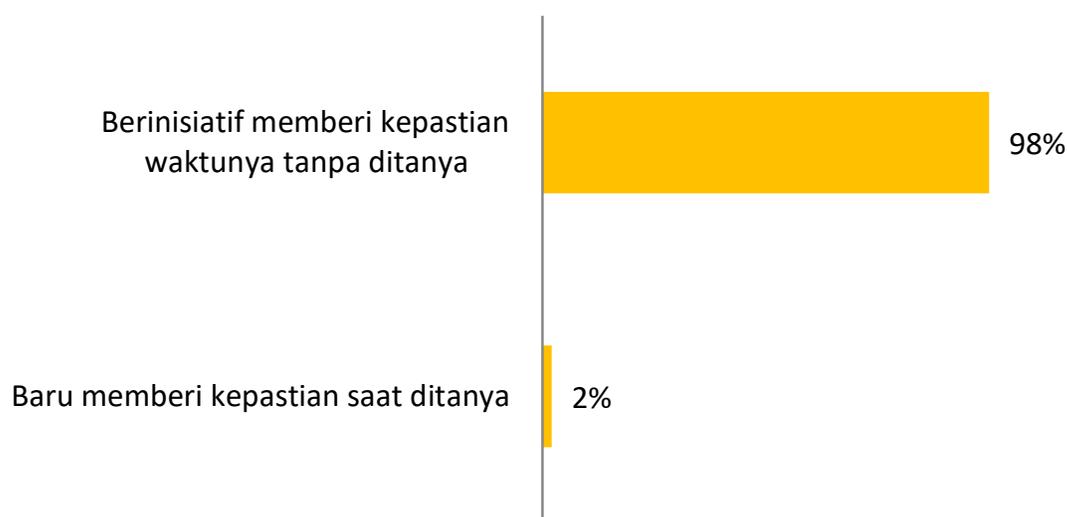
**Gambar 5.7**  
**Persentase Responden yang mengetahui adanya fasilitas kotak pengaduan/saran**

Keempat, tentang jumlah petugas (Gambar 5.8). Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses penyelesaian layanan. Disaat jumlah petugas sudah tidak sebanding dengan jumlah pengajuan pengurusan yang masuk di Kecamatan Semanding, maka akan sangat rentan menimbulkan ketidakpuasan pengguna layanan terkait dengan kecepatan penyelesaian layanan, dan hal ini tentunya bukanlah hal yang diharapkan oleh pengguna layanan. Berdasarkan hasil survei, 98 % responden menilai bahwa jumlah petugas yang melayani di Kecamatan Semanding sudah mencukupi. Namun, yang tidak boleh diabaikan adalah penilai dari 2 % lainnya yang beranggapan bahwa jumlah petugas belumlah mencukupi sehingga perlu adanya penambahan. Responden beranggapan untuk menghindari antrian diharapkan adanya penambahan petugas.



**Gambar 5.8**  
**Jumlah Petugas di Kecamatan Semanding**

Kelima, tentang kepastian waktu pelayanan (Gambar 5.9). Kemampuan memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan akan membuat masyarakat pengguna layanan yakin bahwa urusannya akan selesai tepat waktu. Berdasarkan hasil survei, terdapat 98% responden menyatakan petugas memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian layanan tanpa ditanya terlebih dahulu oleh pengguna layanan, sedangkan 2% responden menyatakan jika petugas baru memberikan kepastian saat ditanya



**Gambar 5.9**  
**Kepastian Waktu Pelayanan di Kecamatan Semanding**

### 2.3.3. Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat

Fungsi Kecamatan sebagai pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat, menurut :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
- 8) Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 9) Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 11) Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12) Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2016.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Semanding maka perlu di tetapkan indikator kinerja utama. Beberapa indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Semanding antara lain :

- a. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan yang ditindaklanjuti (%);
- b. Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes;
- c. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa beradministrasi baik;
- d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- e. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Persentase Pelanggaran yang ditindaklanjuti (%)	%	100 %	70 %	70%	
2	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes (%)	%	100 %	70%	70%	
3	Persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	%	100%	70%	70%	

## 1. Tabel Persentase Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		Ket
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
1	Persentase Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan tentang desa/kelurahan	%	100 %	60%	70 %	-	
2	Persentase Desa/Kelurahan telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	%	100 %	60%	70 %	-	
3	Prosentase desa telah menyusun dokumen perencanaan desa (RPJM Desa, RKP Desa) dengan kualitas baik	%	100 %	75%	80 %	-	

## 2. Tabel Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Beradministrasi Baik (LPMD, PKK, Karang Taruna, BUMDES)

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan	%	100 %	60%	70 %	-	

Administrasi  
Desa/Kelurahan  
sesuai dengan  
ketentuan  
tentang  
desa/kelurahan

- 2    Persentase  
Lembaga                   %       100 %     60%     70 %       -
- Kemasyarakatan  
Desa/Kelurahan  
telah mengisi  
buku  
administrasi  
keuangan desa  
sesuai dengan  
ketentuan
- 3    Prosentase  
Lembaga                               100 %     60%     70 %
- Kemasyarakatan  
desa telah  
menyusun  
dokumen  
perencanaan  
desa (RPJM  
Desa, RKP Desa)  
dengan kualitas  
baik

### 3. Prosentase desa memiliki BUMDES

Kecamatan Semanding terdiri dari 2 Kelurahan dan 15 Desa, yang sudah memiliki BUMDes baru 3 (tiga) Desa.

### 4. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Pengaduan	kali	100	100%	100%	

Masyarakat yang di tindaklanjuti						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Analisa SWOT digunakan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kinerja layanan publik Kecamatan Semanding berdasarkan tiap dimensi yaitu dimensi tampilan fisik (*tangible*), dimensi reliabilitas (*reliability*), dimensi daya tanggap (*responsiveness*), dimensi jaminan (*assurance*), dan dimensi empati (*emphaty*) yang diambil dari analisis kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Analisa SWOT dimensi tampilan fisik (*tangible*) yang diperoleh dari hasil pertanyaan persepsi kepuasan responden di Kecamatan Semanding dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pertanyaan yang akan menjadi **Kekuatan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi tampilan fisik (*tangible*) yang mendapatkan penilaian baik dari responden antara lain:
  - Kebersihan toilet dan fasilitas yang ada.
2. Pertanyaan yang akan menjadi **Kelemahan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi tampilan fisik (*tangible*) yang mendapatkan penilaian kurang baik dari responden tidak ada.
3. Pertanyaan yang akan menjadi **Peluang** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi tampilan fisik (*tangible*) yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas antara lain.
  - Kondisi gedung kecamatan.
  - Kelengkapan dan kebersihan ruangan pelayanan.
  - Kerapian penampilan petugas pelayanan.
  - Kemudahan menjangkau Kecamatan dengan semua alat transportasi.
  - Kenyamanan tempat parkir Kecamatan.
  - Aturan tertulis berfungsi dengan baik (tulisan dapat dibaca dan dipahami).
  - Alur prosedur pelayanan tertulis mudah dipahami pengguna layanan.
  - Tempelan-tempelan informasi pelayanan yang ada di Kecamatan menarik perhatian dan mudah dipahami pengguna layanan.
  - Jumlah petugas pelayanan memadai (Sesuai dengan jumlah pengguna layanan yang datang).
  - Pemanggilan nama pengguna layanan saat giliran terdengar jelas.

4. Pertanyaan yang akan menjadi **Ancaman** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi tampilan fisik (*tangible*) yang dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat menjadi tidak baik antara lain.
- Kebersihan R. Smoking area dan fasilitas yang ada.
  - Kebersihan R. Pojok Asi dan fasilitas yang ada' tidak ada.
  - Fasilitas pelayanan lengkap, baik dan memadai.
  - Kenyamanan fasilitas ruang tunggu dan sesuai dengan jumlah pengguna layanan.

Analisa SWOT dimensi reliabilitas (*reliability*) yang diperoleh dari hasil pertanyaan persepsi kepuasan responden di Kecamatan Semanding dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pertanyaan yang akan menjadi **Kekuatan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi reliabilitas (*reliability*) yang mendapatkan penilaian baik dari responden antara lain.
  - Petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
  - Sistem antri mudah dan cepat.
  - Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit (menyulitkan pelanggan)
2. Pertanyaan yang akan menjadi **Kelemahan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi reliabilitas (*reliability*) yang mendapatkan penilaian kurang baik dari responden antara lain.
  - Konsultasi dengan petugas pelayanan jelas dan mudah dimengerti
  - Petugas dapat mengidentifikasi keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat
3. Pertanyaan yang akan menjadi **Peluang** Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi reliabilitas (*reliability*) yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas antara lain.
  - Proses pelayanan cepat dan tepat.
  - Memberlakukan prioritas pelayanan yang sama kepada setiap pengguna layanan.

Pertanyaan yang akan menjadi **Ancaman** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi reliabilitas (*reliability*) yang dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat menjadi tidak baik antara lain.

- Petugas dapat menjawab keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat.

Analisa SWOT dimensi daya tanggap (*responsiveness*) yang diperoleh dari hasil pertanyaan persepsi kepuasan responden di Kecamatan Semanding dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pertanyaan yang akan menjadi **Kekuatan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi daya tanggap (*responsiveness*) yang mendapatkan penilaian baik dari responden antara lain.
  - Petugas pelayanan tidak pernah sibuk untuk menanggapi permintaan maupun keluhan pengguna layanan.
2. Pertanyaan yang akan menjadi **Kelemahan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi daya tanggap (*responsiveness*) yang mendapatkan penilaian kurang baik dari responden antara lain.
  - Pengguna layanan memperhatikan tempelan-tempelan informasi pelayanan di Kecamatan.
3. Pertanyaan yang akan menjadi **Peluang** Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi daya tanggap (*responsiveness*) yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas antara lain.
  - Pelayanan dimulai tepat waktu.
  - Aturan tertulis tidak diacuhkan oleh pengguna layanan dan petugas pelayanan.
4. Pertanyaan yang akan menjadi **Ancaman** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi daya tanggap (*responsiveness*) yang dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat menjadi tidak baik antara lain.
  - Karyawan/petugas pelayanan memberikan pelayanan secara tepat, cepat, dan tanggap.

Analisa SWOT dimensi jaminan (*assurance*) yang diperoleh dari hasil pertanyaan persepsi kepuasan responden di Kecamatan Semanding dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pertanyaan yang akan menjadi **Kekuatan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi jaminan (*assurance*) yang mendapatkan penilaian baik dari responden antara lain.
  - Petugas pelayanan selalu bersikap sopan dan ramah
  - Biaya pelayanan masih dalam tingkat kewajaran
2. Pertanyaan yang akan menjadi **Kelemahan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi jaminan (*assurance*) yang mendapatkan penilaian kurang baik dari responden antara lain.
  - Perilaku karyawan/petugas pelayanan menumbuhkan kepercayaan, perasaan aman, dan terjamin dalam melakukan konsultasi masalah pelayanan.

- Pengetahuan dan kemampuan karyawan/petugas pelayanan cukup untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan.
  - Kepastian selesainya layanan yang diurus pengguna layanan tepat.
3. Pertanyaan yang akan menjadi **Peluang** Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi jaminan (*assurance*) yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas tidak ada.
  4. Pertanyaan yang akan menjadi **Ancaman** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi jaminan (*assurance*) yang dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat menjadi tidak baik antara lain.
    - Tempat parkir yang disediakan terjamin keamanannya.

Analisa SWOT dimensi empati (*emphaty*) yang diperoleh dari hasil pertanyaan persepsi kepuasan responden di Kecamatan Semanding dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pertanyaan yang akan menjadi **Kekuatan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi empati (*emphaty*) yang mendapatkan penilaian baik dari responden antara lain.
  - Karyawan/petugas layanan memberikan pelayanan kepada semua pengguna layanan tanpa pilih-pilih.
2. Pertanyaan yang akan menjadi **Kelemahan** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi empati (*emphaty*) yang mendapatkan penilaian kurang baik dari responden antara lain.
  - Memberikan perhatian secara pribadi dan adil.
  - Karyawan/petugas layanan memahami kebutuhan khusus para pengguna layanan.
3. Pertanyaan yang akan menjadi **Peluang** Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi empati (*emphaty*) yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas tidak ada.
4. Pertanyaan yang akan menjadi **Ancaman** bagi Kecamatan Semanding berdasarkan dimensi empati (*emphaty*) yang dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat menjadi tidak baik tidak ada.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, selanjutnya akan dilakukan analisis agar dapat diketahui strategi yang tepat bagi Kecamatan Semanding. Berikut penyusunan strategi yang dari hasil identifikasi .

Tabel 5.5  
SWOT Matrix

Strengths		Opportunities	
S1	Kebersihan toilet dan fasilitas yang ada.	O1	Kondisi gedung kecamatan.
S2	Petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.	O2	Kelengkapan dan kebersihan ruangan pelayanan.
S3	Sistem antri mudah dan cepat.	O3	Kerapian penampilan petugas pelayanan.
S4	Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit (menyulitkan pelanggan)	O4	Kemudahan menjangkau Kecamatan dengan semua alat transportasi.
S5	Petugas pelayanan tidak pernah sibuk untuk menanggapi permintaan maupun keluhan pengguna layanan.	O5	Kenyamanan tempat parkir Kecamatan.
S6	Petugas pelayanan selalu bersikap sopan dan ramah	O6	Aturan tertulis berfungsi dengan baik (tulisan dapat dibaca dan dipahami).
S7	Biaya pelayanan masih dalam tingkat kewajaran	O7	Alur prosedur pelayanan tertulis mudah dipahami pengguna layanan.
S8	Karyawan/petugas layanan memberikan pelayanan kepada semua pengguna layanan tanpa pilih-pilih.	O8	Tempelan-tempelan informasi pelayanan yang ada di Kecamatan menarik perhatian dan mudah dipahami pengguna layanan.
Threats		O9	Jumlah petugas pelayanan memadai (Sesuai dengan jumlah pengguna layanan yang datang).
T1	Kebersihan R. Smoking area dan fasilitas yang ada.	O10	Pemanggilan nama pengguna layanan saat giliran terdengar jelas.
T2	Kebersihan R. Pojok Asi dan fasilitas yang ada.	O11	Proses pelayanan cepat dan tepat.
T3	Fasilitas pelayanan lengkap, baik dan memadai.	O12	Memberlakukan prioritas pelayanan yang sama kepada setiap pengguna layanan.
T4	Kenyamanan fasilitas ruang tunggu dan sesuai dengan jumlah pengguna layanan.	O13	Pelayanan dimulai tepat waktu.
T5	Petugas dapat menjawab keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat.	O14	Aturan tertulis tidak diacuhkan oleh pengguna layanan dan petugas pelayanan.

Tabel 5.5  
SWOT Matrix

Strengths		Opportunities	
S1	Kebersihan toilet dan fasilitas yang ada.	O1	Kondisi gedung kecamatan.
S2	Petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.	O2	Kelengkapan dan kebersihan ruangan pelayanan.
S3	Sistem antri mudah dan cepat.	O3	Kerapian penampilan petugas pelayanan.
S4	Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit (menyulitkan pelanggan)	O4	Kemudahan menjangkau Kecamatan dengan semua alat transportasi.
S5	Petugas pelayanan tidak pernah sibuk untuk menanggapi permintaan maupun keluhan pengguna layanan.	O5	Kenyamanan tempat parkir Kecamatan.
S6	Petugas pelayanan selalu bersikap sopan dan ramah	O6	Aturan tertulis berfungsi dengan baik (tulisan dapat dibaca dan dipahami).
S7	Biaya pelayanan masih dalam tingkat kewajaran	O7	Alur prosedur pelayanan tertulis mudah dipahami pengguna layanan.
S8	Karyawan/petugas layanan memberikan pelayanan kepada semua pengguna layanan tanpa pilih-pilih.	O8	Tempelan-tempelan informasi pelayanan yang ada di Kecamatan menarik perhatian dan mudah dipahami pengguna layanan.
Threats		O9	Jumlah petugas pelayanan memadai (Sesuai dengan jumlah pengguna layanan yang datang).
T1	Kebersihan R. Smoking area dan fasilitas yang ada.	O10	Pemanggilan nama pengguna layanan saat giliran terdengar jelas.
T2	Kebersihan R. Pojok Asi dan fasilitas yang ada.	O11	Proses pelayanan cepat dan tepat.
T3	Fasilitas pelayanan lengkap, baik dan memadai.	O12	Memberlakukan prioritas pelayanan yang sama kepada setiap pengguna layanan.
T4	Kenyamanan fasilitas ruang tunggu dan sesuai dengan jumlah pengguna layanan.	O13	Pelayanan dimulai tepat waktu.
T5	Petugas dapat menjawab keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat.	O14	Aturan tertulis tidak diacuhkan oleh pengguna layanan dan petugas pelayanan.

Threats		Strategi SO
T6	Karyawan/petugas pelayanan memberikan pelayanan secara tepat, cepat, dan tanggap.	Pembenahan dan perawatan rutin kebersihan toilet (S1,O2)
T7	Tempat parkir yang disediakan terjamin keamanannya.	Dilakukan penambahan pengeras suara untuk memperjelas pemanggilan pengguna layanan dan proses pelayanan tepat sasaran (S2,O10)
Strategi ST		Diberlakukan sistem nomor urut antrian (S3,O11)
Perlunya pengadaan pendingin ruangan dan TV di ruang tunggu serta space tambahan untuk fasilitas R. Smoking Area dan R. Pojok ASI di Kecamatan (S2,T3)		Dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam bentuk skema yang akan diterapkan dalam proses pelayanan (S4,O7)
Petugas lebih meningkatkan skill dan wawasan yang luas untuk dapat menjawab semua keluhan pengguna layanan (S5,T5)		Perlunya dibuat peraturan/standar berpakaian dan terjadwal untuk petugas pelayanan agar tampak sopan dihadapan pengguna layanan (S6,O3)
		Petugas pelayanan lebih profesional dalam melakukan proses pelayanan (S8,O12)

Weakness		Opportunities	
W1	Konsultasi dengan petugas pelayanan jelas dan mudah dimengerti	O1	Kondisi gedung kecamatan.
W2	Petugas dapat mengidentifikasi keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat	O2	Kelengkapan dan kebersihan ruangan pelayanan.
W3	Pengguna layanan memperhatikan tempelan-tempelan informasi pelayanan di Kecamatan.	O3	Kerapian penampilan petugas pelayanan.
W4	Perilaku karyawan/petugas pelayanan menumbuhkan kepercayaan, perasaan aman, dan terjamin dalam melakukan konsultasi masalah pelayanan.	O4	Kemudahan menjangkau Kecamatan dengan semua alat transportasi.
W5	Pengetahuan dan kemampuan karyawan/petugas pelayanan cukup untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan.	O5	Kenyamanan tempat parkir Kecamatan.
W6	Kepastian selesainya layanan yang diurus pengguna layanan tepat.	O6	Aturan tertulis berfungsi dengan baik (tulisan dapat dibaca dan dipahami).
W7	Memberikan perhatian secara pribadi dan adil.	O7	Alur prosedur pelayanan tertulis mudah dipahami pengguna layanan.

W8	Karyawan/petugas layanan memahami kebutuhan khusus para pengguna layanan.	O8	Tempelan-tempelan informasi pelayanan yang ada di Kecamatan menarik perhatian dan mudah dipahami pengguna layanan.
<b>Threats</b>		O9	Jumlah petugas pelayanan memadai (Sesuai dengan jumlah pengguna layanan yang datang).
T1	Kebersihan R. Smoking area dan fasilitas yang ada.	O10	Pemanggilan nama pengguna layanan saat giliran terdengar jelas.
T2	Kebersihan R. Pojok Asi dan fasilitas yang ada.	O11	Proses pelayanan cepat dan tepat.
T3	Fasilitas pelayanan lengkap, baik dan memadai.	O12	Memberlakukan prioritas pelayanan yang sama kepada setiap pengguna layanan.
T4	Kenyamanan fasilitas ruang tunggu dan sesuai dengan jumlah pengguna layanan.	O13	Pelayanan dimulai tepat waktu.
T5	Petugas dapat menjawab keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat.	O14	Aturan tertulis tidak diajukan oleh pengguna layanan dan petugas pelayanan.

<b>Threats</b>		<b>Strategi W O</b>
T6	Karyawan/petugas pelayanan memberikan pelayanan secara tepat, cepat, dan tanggap.	Informasi yang telah dibuat didesain lebih menarik dengan mengganti background atau jenis font agar mudah terbaca (W3,O8)
T7	Tempat parkir yang disediakan terjamin keamanannya.	Perlunya kegiatan training untuk meningkatkan skill petugas pelayanan dalam mengidentifikasi keluhan pengguna layanan (W2,O11)
<b>Strategi W T</b>		
Petugas meningkatkan kemampuan bersosialisasi yang baik untuk mempermudah pemahaman pengguna saat konsultasi (W1,T6)		
Perlunya dilakukan workshop secara berkala yang membahas isu-isu terbaru untuk pengetahuan karyawan yang lebih luas (W5,T5)		
Petugas lebih meningkatkan pengamanan tempat parkir dengan penjagaan di kedua pintu tempat parkir (W6,T7)		

Pada pengolahan data selanjutnya akan dilakukan analisis dengan *IFE* dan *EFE matrix* berdasarkan kondisi internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. *IFE matrix* (*Internal Factor Evaluation*) merupakan *matrix* yang menampilkan data internal perusahaan baik faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) maupun kelemahan (*weakness*). *EFE* (*External Factor Evaluation*) merupakan *matrix* yang menampilkan data eksternal perusahaan baik faktor yang menjadi peluang (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*). Berikut ini adalah tabel dari *IFE* dan *EFE matrix*

Strength		Score	Bobot	Total
S1	Kebersihan toilet dan fasilitas yang ada.	3	0.102	0.306
S2	Petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.	3	0.094	0.282
S3	Sistem antri mudah dan cepat.	2	0.076	0.152
S4	Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit (menyulitkan pelanggan)	4	0.136	0.544
S5	Petugas pelayanan tidak pernah sibuk untuk menanggapi permintaan maupun keluhan pengguna layanan.	3	0.109	0.327
S6	Petugas pelayanan selalu bersikap sopan dan ramah	4	0.171	0.684
S7	Biaya pelayanan masih dalam tingkat kewajaran	4	0.132	0.528
S8	Karyawan/petugas layanan memberikan pelayanan kepada semua pengguna layanan tanpa pilih-pilih.	4	0.18	0.72
<b>Total</b>			1	3.543
Weaknesses		Score	Bobot	Total
W1	Konsultasi dengan petugas pelayanan jelas dan mudah dimengerti	4	0.134	0.536
W2	Petugas dapat mengidentifikasi keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat	4	0.157	0.628
W3	Pengguna layanan memperhatikan tempelan-tempelan informasi pelayanan di Kecamatan.	4	0.115	0.46
W4	Perilaku karyawan/petugas pelayanan menumbuhkan kepercayaan, perasaan aman, dan terjamin dalam melakukan konsultasi masalah pelayanan.	3	0.107	0.321
W5	Pengetahuan dan kemampuan karyawan/petugas pelayanan cukup untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan.	4	0.18	0.72
W6	Kepastian selesainya layanan yang diurus pengguna layanan tepat.	4	0.142	0.568
W7	Memberikan perhatian secara pribadi dan adil.	2	0.07	0.14
W8	Karyawan/petugas layanan memahami kebutuhan khusus para pengguna layanan.	3	0.095	0.285
<b>Total</b>			1	3.658
<b>Selisih</b>				-0.12

Opportunities		Score	Bobot	Total
O1	Kondisi gedung kecamatan.	2	0.052	0.104
O2	Kelengkapan dan kebersihan ruangan pelayanan.	2	0.059	0.118
O3	Kerapian penampilan petugas pelayanan.	3	0.071	0.213
O4	Kemudahan menjangkau Kecamatan dengan semua alat transportasi.	3	0.064	0.192
O5	Kenyamanan tempat parkir Kecamatan.	4	0.085	0.34
O6	Aturan tertulis berfungsi dengan baik (tulisan dapat dibaca dan dipahami).	4	0.081	0.324
O7	Alur prosedur pelayanan tertulis mudah dipahami pengguna layanan.	4	0.084	0.336
O8	Tempelan-tempelan informasi pelayanan yang ada di Kecamatan menarik perhatian dan mudah dipahami pengguna layanan.	3	0.066	0.198
O9	Jumlah petugas pelayanan memadai (Sesuai dengan jumlah pengguna layanan yang datang).	3	0.07	0.21
O10	Pemanggilan nama pengguna layanan saat giliran terdengar jelas.	2	0.045	0.09
O11	Proses pelayanan cepat dan tepat.	3	0.078	0.234
O12	Memberlakukan prioritas pelayanan yang sama kepada setiap pengguna layanan.	4	0.09	0.36
O13	Pelayanan dimulai tepat waktu.	3	0.076	0.228
O14	Aturan tertulis tidak diacuhkan oleh pengguna layanan dan petugas pelayanan.	3	0.079	0.237
<b>Total</b>			1	3.184

Threats		Score	Bobot	Total
T1	Kebersihan R. Smoking area dan fasilitas yang ada.	1	0.065	0.065
T2	Kebersihan R. Pojok Asi dan fasilitas yang ada.	1	0.056	0.056
T3	Fasilitas pelayanan lengkap, baik dan memadai.	2	0.096	0.192
T4	Kenyamanan fasilitas ruang tunggu dan sesuai dengan jumlah pengguna layanan.	2	0.103	0.206
T5	Petugas dapat menjawab keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat.	4	0.24	0.96
T6	Karyawan/petugas pelayanan memberikan pelayanan secara tepat, cepat, dan tanggap.	4	0.226	0.904
T7	Tempat parkir yang disediakan terjamin keamanannya.	4	0.214	0.856
T5	Petugas dapat menjawab keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat.	1	0.065	0.065
<b>Total</b>			1	3.239
<b>Selish</b>				-0.055

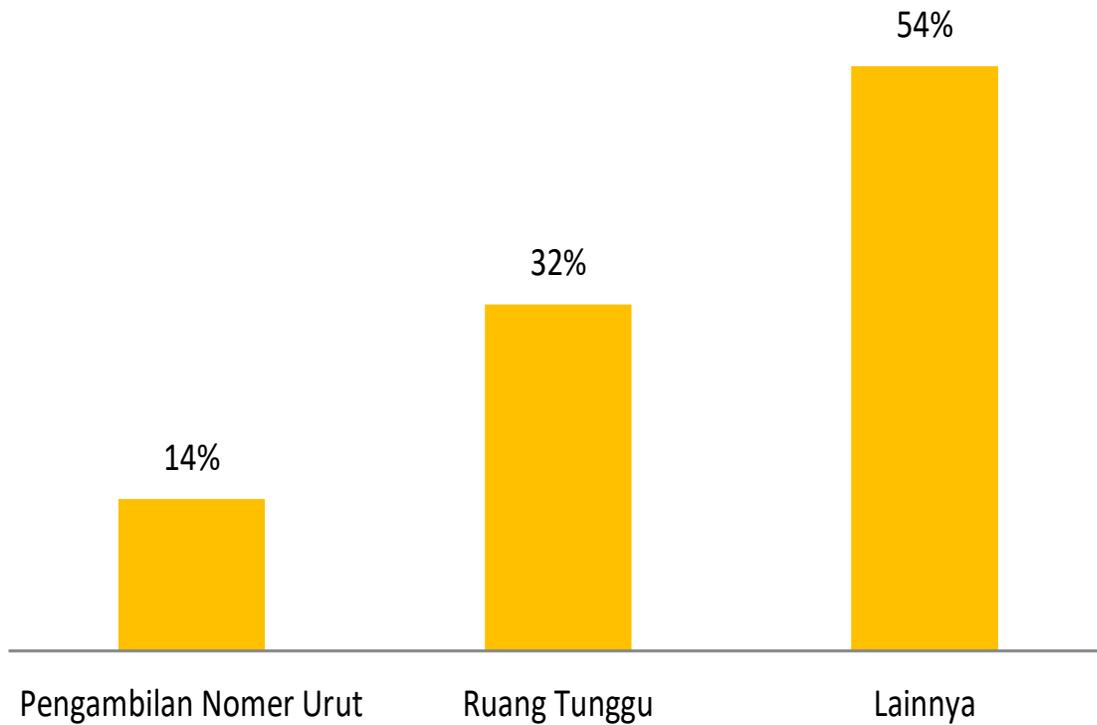
Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan nilai faktor internal dan eksternal sebesar (-0.12) dan (-0.055). Selanjutnya akan dilakukan analisis SWOT map untuk mengetahui strategi yang sesuai untuk digunakan perusahaan berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal. Berikut ini adalah gambar dari SWOT map.



Berdasarkan gambar diatas maka strategi yang digunakan oleh Kecamatan Semanding yaitu dengan pendekatan *weakness - threats (WT Strategy)* dalam menjalankan pelayanan di Kecamatan Semanding.

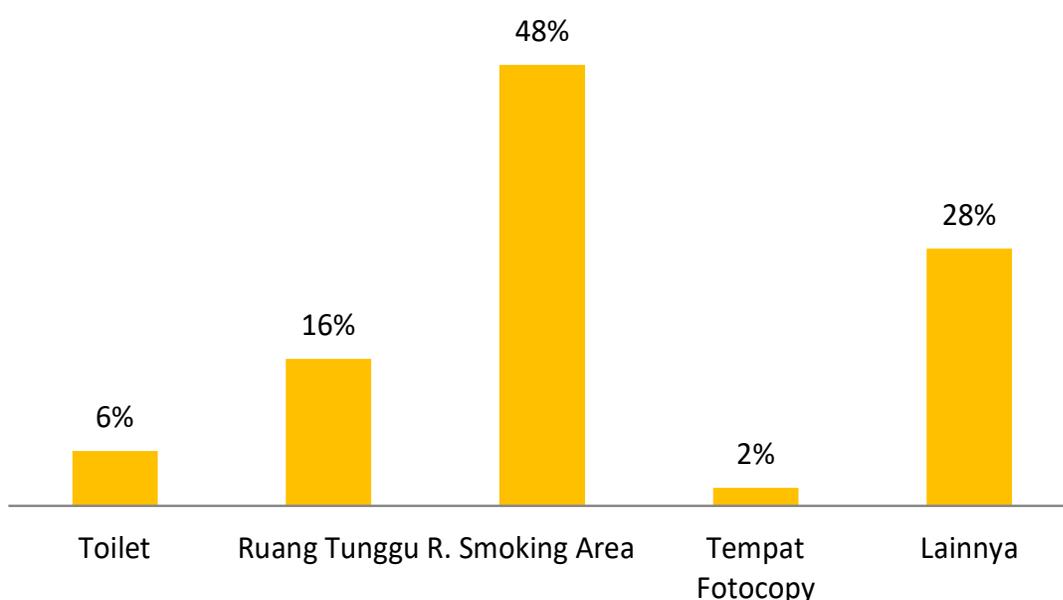
#### HARAPAN RESPONDEN

Harapan atau keinginan responden terhadap pelayanan dan fasilitas yang perlu dibenahi di Kecamatan Semanding merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Pada gambar 5.16 dapat diketahui persentase harapan responden mengenai pelayanan yang terdapat di Kecamatan Semanding. Persentase terbesar responden memilih lainnya sebesar 54% yang memiliki arti sebagian besar responden berpendapat bahwa pelayanan sudah terlaksana dengan baik, namun responden masih memiliki harapan terhadap ruang tunggu dengan persentase sebesar 32% dan pengambilan nomor urut 14%. Sedangkan pada pelayanan belakang dan pelayanan depan (*front office*), responden tidak memiliki harapan pada pelayanan tersebut. Harapan mereka untuk jenis pelayanan seperti ruang tunggu dan pengambilan nomor urut yaitu perlu tersedianya sistem nomor antrian.



**Gambar 5.16**  
**Persentase Harapan Responden**  
**Terhadap Pelayanan Di Kecamatan Semanding**

Tidak hanya Pelayanan, Fasilitas yang terdapat di Kecamatan Semanding juga diharapkan dapat berkembang lebih baik lagi, dengan tujuan agar masyarakat atau penggunalayanan yang berkunjung merasa nyaman. Beberapa harapan responden terhadap fasilitas yang ada di Kecamatan Semanding dapat dilihat pada gambar 5.17 yang menunjukkan sebagian responden memilih lainnya dengan persentase sebesar 28%. Besarnya responden yang memilih lainnya didominasi dengan pendapat responden yang menjawab tidak ada yang perlu dibenahi ataupun ditambah fasilitasnya. Sedangkan untuk fasilitas seperti toilet yang memiliki nilai persentase 6%, sertaruang tunggu yang memiliki nilai presentase 16%, R. Smoking Area memiliki nilai presentasetertinggi sebesar 48% dan tempat fotocopy yang memiliki nilai persentase sebesar 2%. Harapan responden secara umum terhadap fasilitas yang perlu diperbaiki dan ditambah diKecamatan yaitu toilet perlu dibersihkan setiap hari, perlunya penambahan TV, AC/kipas angin dan kursi di ruang tunggu, serta adanya penambahan fasilitas R. Smoking area agar dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan yang tidak merokok. Pada fasilitas R. Pojok ASI, parkir, dan kantin responden tidak memiliki harapan kedepan untuk fasilitas tersebut. Responden berpendapat bahwa fasilitas tersebut belum menjadi pembenahan yang utama dalam kedepannya.



**Gambar 5.17**  
**Persentase Harapan Responden**  
**Terhadap Fasilitas Pelayanan Di Kecamatan Semanding**

#### 2.4.1 Tantangan pengembangan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

Kecamatan Semanding dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengembangan Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang akan dihadapi baik itu tantangan dan permasalahan dari internal maupun external Kecamatan Semanding sendiri, akan tetapi permasalahan dan tantangan tersebut harus dihadapi dan kita anggap sebagai tantangan untuk menjadikan Kecamatan Semanding secara umum dan Desa/Kelurahan secara khusus menjadi lebih baik dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat

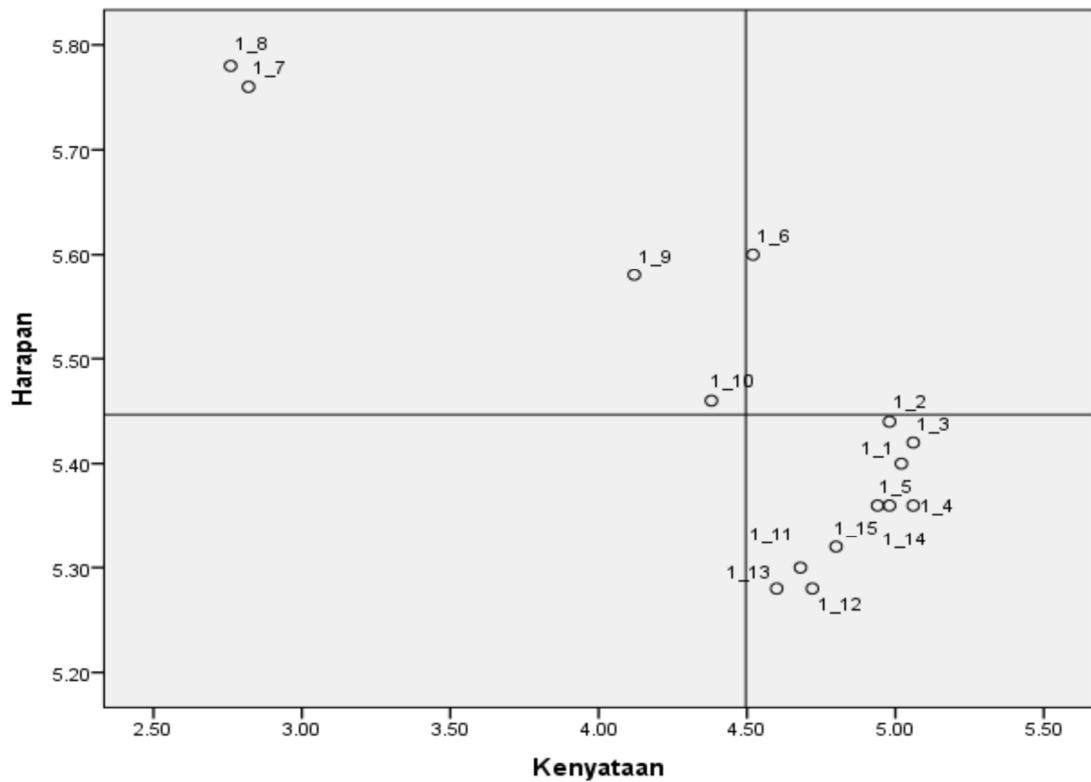
1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai/perangkat di kecamatan dan desa/kelurahan di bandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Kewenangan dan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan;
4. Cakupan wilayah dan karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

6. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengangguran;
7. Banyaknya persoalan sosial antara lain : produsen arak terbesar, maraknya peredaran dan pengguna narkoba, kenakalan remaja, perjudian, angka kecelakaan tinggi dll;
8. Potensi alam dan wilayah sangat menjanjikan tetapi belum tergarap secara optimal sehingga butuh koordinasi, fasilitasi, pendampingan kepada desa agar potensi wilayah yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Dalam menentukan prioritas pembenahan kinerja yang harus dilakukan, yaitu dengan pendekatan melalui kuadran yang menggambarkan hasil penilaian responden terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Semanding. Berikut beberapa dimensi yang akan dilakukan analisa kesenjangan antara kenyataan dan harapan responden yang digunakan untuk pembenahan kinerja di Kecamatan Semanding.

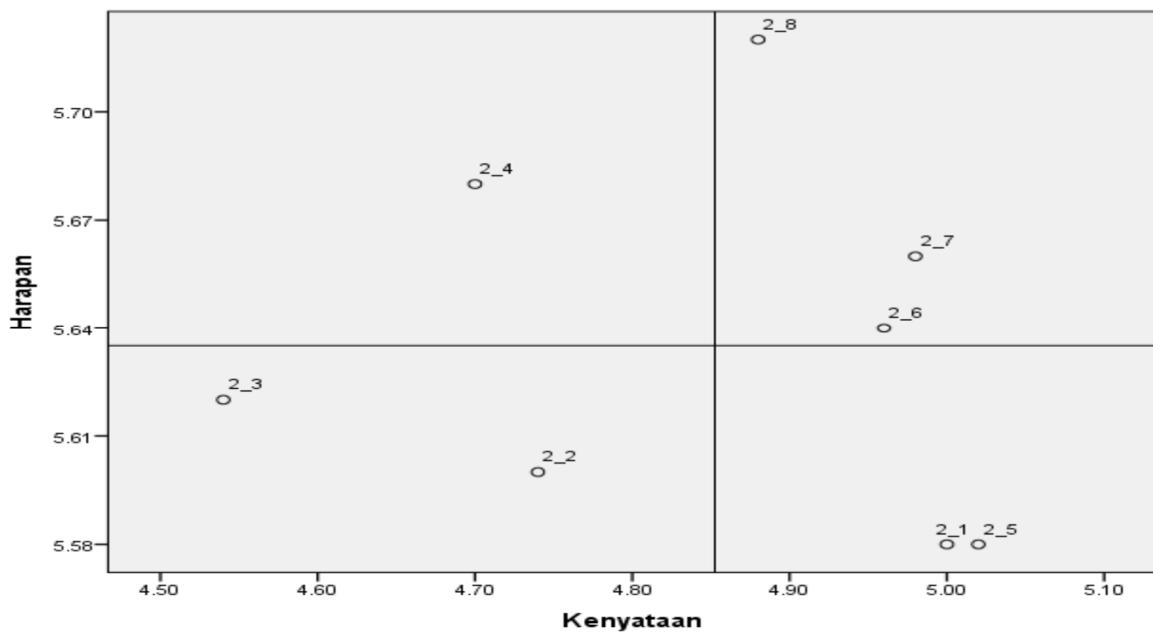
Dimensi tampilan fisik (*tangible*) merupakan kumpulan dari pertanyaan yang berhubungan dengan ketersediaan dan kualitas tampilan fisik fasilitas yang ada di Kecamatan Semanding. Pada dimensi tampilan fisik terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi prioritas utama dalam perbaikan yaitu pertanyaan tentang Kebersihan R. Smoking area dan fasilitas yang ada (1\_7), Kebersihan R. Pojok Asi dan fasilitas yang ada (1\_8), Fasilitas pelayanan lengkap, baik dan memadai (1\_9), serta Kenyamanan fasilitas ruang tunggu dan sesuai dengan jumlah pengguna layanan (1\_10). Pertanyaan tersebut menjadi prioritas utama pembenahan dikarenakan responden memiliki harapan yang lebih untuk penambahan fasilitas di Kecamatan, agar masyarakat dapat melakukan pelayanan dengan nyaman. Sedangkan pertanyaan yang perlu dipertahankan dan dilakukan perbaikan lebih baik lagi oleh Kecamatan Semanding yaitu pertanyaan tentang Kebersihan toilet dan fasilitas yang ada (1\_6).



**Gambar 5.10**

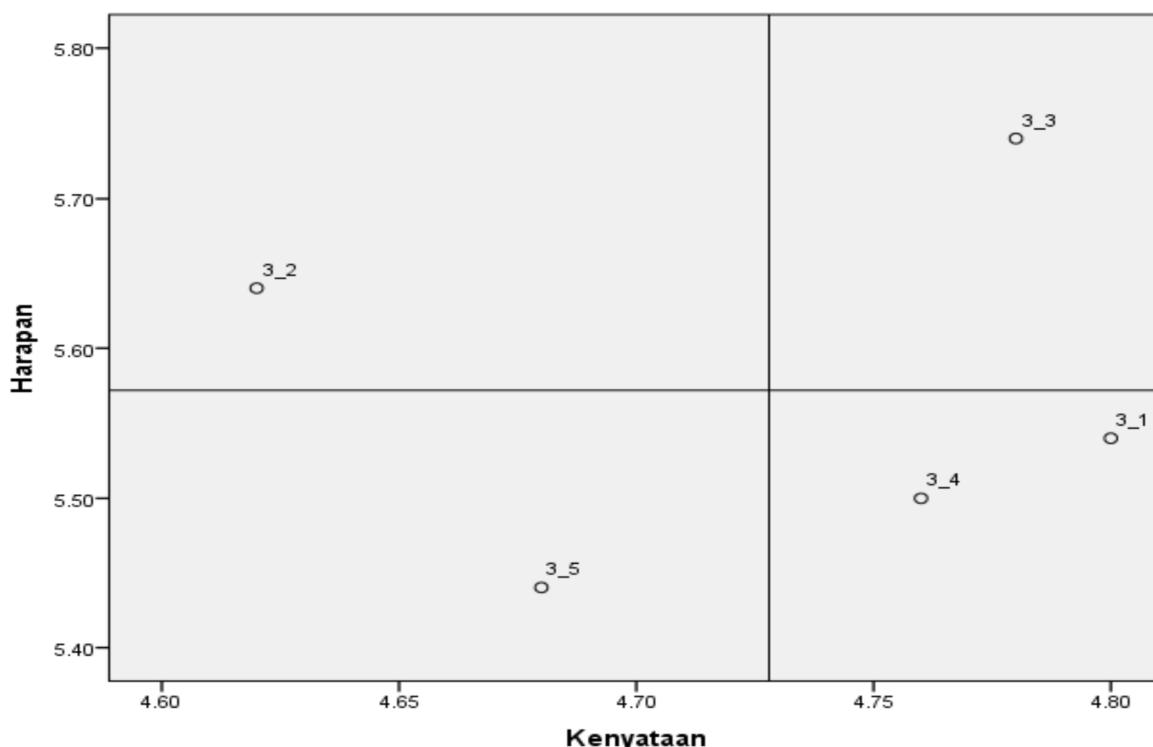
**Analisa Kesenjangan Antara Kenyataan dan Harapan  
Dimensi *Tangible***

Dimensi reliabilitas (reliability) merupakan kumpulan dari beberapa pertanyaan keandalan pelayanan yang ada di Kecamatan Semanding. Analisa kesenjangan antara kenyataan dan harapan dimensi reliabilitas dapat dilihat pada gambar 5.11 yang menunjukkan bahwa terdapat pertanyaan pada dimensi ini yang menjadi prioritas utama pembenahan yaitu pertanyaan tentang petugas dapat menjawab keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat (2\_4). Pada pertanyaan Konsultasi dengan petugas pelayanan jelas dan mudah mengerti (2\_2) dan Petugas dapat mengidentifikasi keluhan pengguna layanan dengan cepat dan tepat (2\_3) juga perlu dilakukan pembenahan selanjutnya, meskipun bukan menjadi prioritas utama pembenahan. Sedangkan untuk pertanyaan tentang Petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan (2\_6), Sistem antri mudah dan cepat (2\_7), serta Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit (menyulitkan pengguna layanan) (2\_8) perlu dipertahankan dan dilakukan pembenahan jika diperlukan karena pertanyaan tersebut memiliki nilai harapan dan kenyataan yang tinggi.



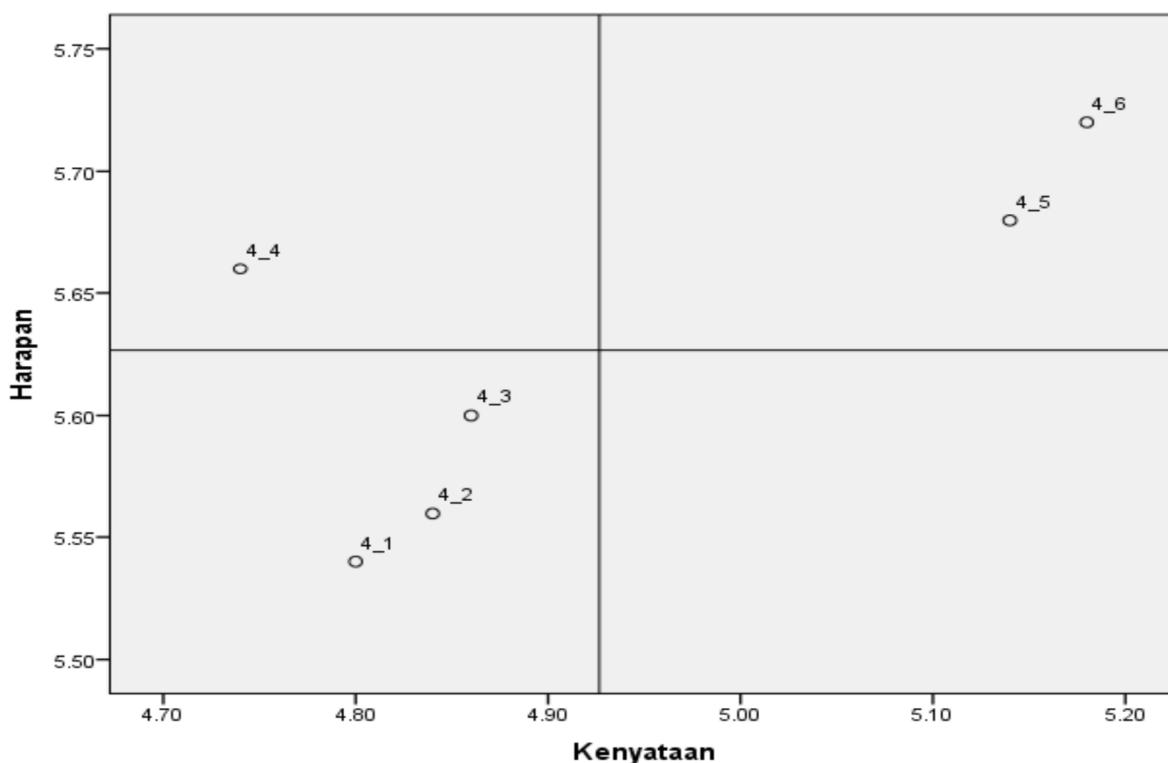
**Gambar 5.11**  
**Analisa kesenjangan antara Harapan dan Kenyataan**  
**Dimensi Realibility**

Dimensi daya tanggap (*responsiveness*) merupakan kumpulan pertanyaan yang menyatakan kecepatan, ketepatan, dan ketanggapan petugas pelayanan dalam melayani. Pada dimensi daya tanggap, terdapat satu pertanyaan yang menjadi prioritas utama dalam membenah kinerja petugas pelayanan yaitu pertanyaan tentang Karyawan/petugas pelayanan memberikan pelayanan secara tepat, cepat, dan tanggap (3\_2). Pertanyaan tersebut menjadi prioritas membenah dikarenakan memiliki nilai kenyataan yang rendah namun nilai harapannya tinggi. Sedangkan pada pertanyaan tentang Petugas pelayanan tidak pernah sibuk untuk menanggapi permintaan maupun keluhan pengguna layanan (3\_3) perlu dipertahankan. Berdasarkan kedua pertanyaan dapat diketahui bahwa ketepatan, kecepatan, dan ketanggapan petugas Kecamatan masih perlu ditingkatkan lagi. Mengingat kepuasan pengguna layanan merupakan hal utama penilaian kinerja petugas Kecamatan.



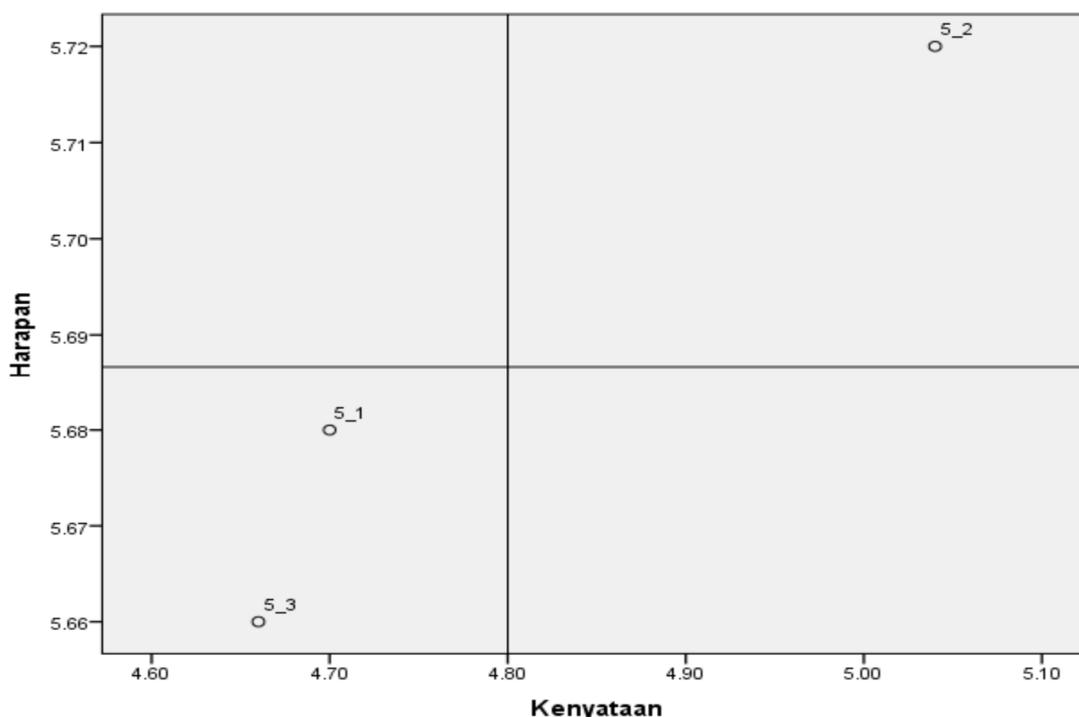
**Gambar 5.12**  
**Analisa Kesenjangan antara Harapan dan Kesenjangan**  
**Dimensi Responsiveness**

Dimensi jaminan (*assurance*) merupakan kumpulan dari pertanyaan yang berhubungan dengan kemampuan petugas pelayanan dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para pengguna layanan. Gambar 5.13 menunjukkan bahwa terdapat satu pertanyaan yang menjadi prioritas utama dalam pembenahan yaitu pertanyaan tentang Tempat parkir yang disediakan terjamin keamanannya (4\_4). Hal ini dikarenakan nilai kenyataan dan harapan yang diperoleh tidak sesuai. Pada pertanyaan tentang perilaku karyawan/petugas pelayanan menumbuhkan kepercayaan, perasaan aman dan terjamin dalam melakukan konsultasi masalah pelayanan (4\_1), pengetahuan dan kemampuan karyawan/petugas pelayanan cukup untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan (4\_2) dan kepastian selesainya layanan yang diurus pengguna layanan tepat (4\_3) juga perlu dilakukan perbaikan atau pembenahan selanjutnya setelah pembenahan prioritas utama dilakukan.



**Gambar 5.13**  
**Analisa Kesenjangan antara Harapan Kenyataan dan harapan**  
**Dimensi assurance**

Dimensi empati (emphaty) merupakan kumpulan dari beberapa pertanyaan mengenai kepekaan atau perhatian para petugas layanan kepada pengguna layanan. Pertanyaan yang terdapat pada dimensi ini hanya ada tiga pertanyaan saja, dimana dua pertanyaan masuk dalam pembenahan kinerja petugas Kecamatan. Sedangkan satu pertanyaan tentang karyawan/petugas layanan memberikan pelayanan kepada semua pengguna layanan tanpa pilih-pilih (5\_2) perlu dipertahankan untuk memuaskan pengguna layanan. Dua pertanyaan yang perlu dilakukan pembenahan meskipun bukan prioritas utama yaitu pertanyaan tentang memberikan perhatian secara pribadi dan adil (5\_1) serta pertanyaan tentang karyawan/petugas layanan memahami kebutuhan khusus para pengguna layanan (5\_3). Kedua pertanyaan tersebut perlu dilakukan pembenahan dikarenakan antara nilai kenyataan dan harapan dari responden rendah.



**Gambar 5.14**  
**Analisa Kesenjangan Antara Kenyataan dan Harapan**  
**Dimensi *Empathy***

#### 2.4.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat

Kecamatan Semanding dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengembangan Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang akan dihadapi baik itu tantangan dan permasalahan dari internal maupun external Kecamatan Semanding sendiri, akan tetapi permasalahan dan tantangan tersebut harus dihadapi dan kita anggap sebagai tantangan untuk menjadikan Kecamatan Semanding secara umum dan Desa/Kelurahan secara khusus menjadi lebih baik dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

##### 2.4.3.1 Tantangan Pengembangan Kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat antara lain :

1. Belum siapnya khususnya penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Rendahnya kualitas SDM Masyarakat Desa dan Kelurahan;

4. Besarnya jumlah keluarga miskin di desa/kelurahan;
5. Banyaknya infrastruktur desa dan kelurahan yang rusak dan belum memadai;
6. Belum ada ruang / kantor untuk pendamping desa di Kecamatan.

#### 2.4.3.2 Peluang Pengembangan kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat

1. Terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa yang mandiri;
2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
3. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan kelurahan serta kelembagaan dalam pembangunan di desa/kelurahan;
4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintah desa dan masyarakat;
5. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
6. Banyaknya potensi di desa/kelurahan yang dapat di kembangkan;
7. Tersedianya anggaran;
8. Ada pendamping desa mulai Tingkat Kabupaten, sampai Kecamatan dan Desa

## BAB III.

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semanding

Berdasarkan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Semanding di Bab terdahulu, berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Semanding :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan yang lebih baik;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan produsen arak, narkoba, judi dll) yang belum optimal;
5. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
6. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu kepada Peraturan da nomor 24 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021, maka kinerja kecamatan memiliki peranan dalam menunjang pencapaian kinerja daerah pada Misi 2 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih,

Misi ke 2 :*Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.*

Tujuan 2 : Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik

Sasaran 2.2 :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik  
Dengan Indikator : Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Misi ke 4 :*Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.*

Tujuan 4: Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahn hasil pertanian, perikanan, potensi unggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja .

Sasaran 4.2 : Meningkatkan nilai tambah hasil produksi unggulann daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Tidak ada –

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Tidak ada \_

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan pada analisa data-data yang ada terkait serta berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban 2016-2021 maka dapat ditentukan isu-isu strategis di Kecamatan Tuban berdasarkan tugas dan fungsi :

1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih

Adanya era otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta diperbarui lagi dengan Undang-undang no. 23 tahun 2014 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan perannya dalam menyongsong pembangunan daerah yang lebih memperhatikan potensi dan keunggulan lokal. Semangat otonomi daerah salah satunya adalah perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka *peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat*. Untuk itu perlu perbaikan yang menyeluruh (komprehensif) baik meliputi sistem administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi yang dikenal sebagai *electronic government (E-Government)* dalam sektor publik.

## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Semanding

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	<i>Nilai IKM</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.23

No	Tujuan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	<i>Nilai IKM</i>	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial	60	70	80	90	100

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1 Strategi dan Kebijakan OPD

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	<i>Nilai IKM</i>	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kinerja Pemerintahan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa

## BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 6.1 .Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan

Penjabaran arah dari keseluruhan perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - e. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan;
  - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair;
  - f. Pembangunan Gedung Kantor;
  - g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
  - b. Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah.
4. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD, meliputi kegiatan :
- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD;
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD;
  - c. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa
- a. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa.
6. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa.
7. Program Peningkatan Kualitas Perijinan
- a. Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan.
8. Program Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan;
  - b. Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

## 6.2. Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan

1. Program Administrasi Perkantoran
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - g. Penyediaan Barang etakan dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Lingkungan
- a. Fasilitasi Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
  - b. Fasilitasi Kegiatan Gotong-royong Masyarakat Kelurahan;
  - c. Fasilitasi Forum Musyawarah Kelurahan;
  - d. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan RT dan RW;
  - e. Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan;
  - f. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna;
  - g. Penguatan Administrasi dan Profil Kelurahan;
  - h. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah.

## Program Per Sasaran

Tabel 2.25

No	Program
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.3	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD
1.4	Program Peningkatan Kualitas Perijinan
1.5	Program Pembinaan Kemasyarakatan
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.	
2.1	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
2.2	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat

## Sasaran

Tabel 2.28

No	Sasaran
Tujuan 1 : Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan public	
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa
Tujuan 2 : Terwujudnya lembaga ekonomi masyarakat desa yang berdaya guna	
1.	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan

## Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan 64riter kecamatan dan kelurahan			
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,17	✓
1.2	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Admnistratif yang Ditindaklanjuti	100 %	✓
1.3	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI		
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.			
2.1	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP & KK) Tepat Waktu	100 %	✓
2.2	Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	100 %	✓
2.3	Prosentase Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	33,33 %	✓
2.4	Prosentase RW Juara	%	✓
2.5	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	✓
2.6	Rasio Anggota Linmas	1 : 3	
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja			
3.1	Nilai AKIP Kecamatan Semanding	C	
3.2	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100 %	

## Target Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,17	77,77	78,25	79	80
1.2	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Admnistratif yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

1.3	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	-	800	860	870	900
2.1	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP & KK) Tepat Waktu	90	90	100	100	100
2.2	Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	90	90	100	100	100
2.3	Prosentase Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	33,33	66,67	100	100	100
2.4	Prosentase RW Juara	-	60	75	75	80
2.5	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	60	80	80	80
2.6	Rasio Anggota Linmas	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3
3.1	Nilai AKIP Kecamatan Semanding	50	60	63	65	70
3.2	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

5.1

5.2 Indikator Kinerja

1. Nilai IKM Kecamatan;
2. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
3. Nilai AKIP Kecamatan;
4. Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes
5. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna);
6. Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Idikatif

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021**  
**KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja		Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Penanggung-jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100		Baik Skala 0-100				
	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah			1.Nilai AKIP Kecamatan Semanding		CC Skala 0-100		B Skala 0-100		B Skala 0-100		BB Skala 0-100		A Skala 0-100		A Skala 0-100				
		3.0.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.Persentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan		80 %	84.587.664	80 %	84.587.664	80 %	84.587.664	80 %	84.587.664	80 %	84.587.664	80 %	422.938.320			
		05.16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Disediakan		60 Stel	24.900.000	60 Stel	24.900.000	60 Stel	24.900.000	60 Stel	24.900.000	60 Stel	24.900.000	Stel	124.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		05.17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	1.Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi		Orang	0	60 Orang	75.164.784	60 Orang	75.164.784	60 Orang	75.164.784	60 Orang	75.164.784	Orang	300.659.136	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		3.0.09.11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.Nilai AKIP Perangkat Daerah		Skala 0-100	0	Skala 0-100	133.440.000	Skala 0-100	133.440.000	Skala 0-100	133.440.000	Skala 0-100	133.440.000	Skala 0-100	533.760.000			
		11.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1.Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	0	9 Dokumen	103.440.000	9 Dokumen	103.440.000	9 Dokumen	103.440.000	9 Dokumen	103.440.000	Dokumen	517.200.000	Sub Bagian Keuangan		
		11.06	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi		Dokumen	0	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	30.000.000	Dokumen	120.000.000	Sub Bagian Program dan Pelaporan		
		3.0.09.50	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi		80 Skala 0-100	208.840.000	80 Skala 0-100	208.840.000	80 Skala 0-100	3.216.340.000	80 Skala 0-100	208.840.000	80 Skala 0-100	208.840.000	80 Skala 0-100	4.051.709.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Perkantoran															
		50.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	1.Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran		Jenis	0	9 Jenis	84.540.000	9 Jenis	88.560.000	9 Jenis	88.560.000	9 Jenis	90.060.000	Jenis	351.720.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		50.02	Penyediaan Peralatan Kantor	1.Jumlah Peralatan Kantor		Jenis	0	8 Jenis	70.900.000	8 Jenis	41.500.000	8 Jenis	70.900.000	8 Jenis	70.900.000	Jenis	254.200.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		50.03	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	1.Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang dipelihara		Jenis	0	9 Jenis	62.280.000	9 Jenis	62.280.000	9 Jenis	62.280.000	9 Jenis	62.280.000	Jenis	249.120.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		50.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan		Jenis	0	Jenis	0	76 Jenis	3.028.500.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	Jenis	3.028.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		50.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti		6 Perdin	6.000.0000	6 Perdin	6.000.000	6 Perdin	7.500.000	6 Perdin	7.500.000	6 Perdin	7.500.000	Perdin	34.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	2.Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa			1.Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Yang Ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan ketertiban umum dan Kesejahteraan Social		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %		100 %			
				2.Jumlah BUMDes pada Tingkat Kecamatan		3 Unit	16.000.000	5 Unit	16.000.000	8 Unit	16.000.000	12 Unit	16.000.000	15 Unit	16.000.000	15 Unit	80.000.000		
		1.1.05.43	Program Pembinaan Kemasyarakatan	1.Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti		60 %	180.230.000	75 %	180.230.000	80 %	2.068.523.100	90 %	180.230.000	100 %	180.230.000	100 %	2.789.443.100		
				2.Persentase Jumlah Usulan Dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan Yang Terealisasi melalui Dana		0 %		0 %		80 %		90 %		100 %		100 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Kelurahan															
		43.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	1.Jumlah Potensi / Masalah Kemasyarakatan yang dikoordinasikan		17 Potensi / Masalah	10.000.000	17 Potensi / Masalah	10.000.000	17 Potensi / Masalah	12.000.000	17 Potensi / Masalah	13.000.000	17 Potensi / Masalah	15.000.000	Potensi / Masalah	60.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
		43.02	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	1.Jumlah Potensi / Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipantau		12 Potensi / Gangguan	10.000.000	12 Potensi / Gangguan	10.000.000	12 Potensi / Gangguan	12.000.000	12 Potensi / Gangguan	13.000.000	12 Potensi / Gangguan	15.000.000	Potensi / Gangguan	60.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
		43.06	Operasional Kelurahan Gedongombo	1.Jumlah Orang Pemohon Layanan Kelurahan		0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	681.846.000	0 Orang	681.846.000	0 Orang	681.846.000	Orang	2.045.538.000	Kelurahan Gedongombo	
		43.07	Operasional Kelurahan Karang	1.Jumlah Orang Pemohon Layanan Kelurahan		0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	412.969.000	0 Orang	412.969.000	0 Orang	412.969.000	Orang	1.238.907.000	Kelurahan Karang	
		43.23	Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongombo	1.Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Hasil Musyawarah Kelurahan yang terealisasi melalui Dana Kelurahan		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	591.391.000	5 Kegiatan	591.391.000	5 Kegiatan	591.391.000	Kegiatan	1.774.173.000	Kelurahan Gedongombo	
		43.24	Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang	1.Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Hasil Musyawarah Kelurahan yang terealisasi melalui Dana Kelurahan		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	346.500.000	5 Kegiatan	346.500.000	5 Kegiatan	346.500.000	Kegiatan	1.039.500.000	Kelurahan Karang	
		43.40	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongombo	1.Jumlah Usulan Pemberdayaan dari Hasil Musyawarah Kelurahan yang terealisasi melalui Dana Kelurahan		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	166.805.100	2 Kegiatan	166.805.100	2 Kegiatan	166.805.100	Kegiatan	500.415.300	Kelurahan Gedongombo	
				2.Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemberdayaan		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		43.41	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang	1.Jumlah Usulan Pemberdayaan dari Hasil Musyawarah Kelurahan yang terealisasi melalui Dana Kelurahan		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	7 Kegiatan	105.167.000	7 Kegiatan	105.167.000	7 Kegiatan	105.167.000	Kegiatan	315.501.000	Kelurahan Karang		
				2.Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemberdayaan		0 Orang		0 Orang		Orang		Orang		Orang		Orang				
		1.2.07.36	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	1.Persentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan		95 %	32.000.000	95 %	32.000.000	95 %	90.900.000	95 %	32.000.000	100 %	32.000.000	%	218.900.000			
		36.01	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	1.Jumlah Desa Mendapatkan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa		15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	74.900.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	Desa	138.900.000	Seksi Pemerintahan		
		36.04	Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	1.Jumlah Desa Terfasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan ADD		15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	Desa	80.000.000	Seksi Pemerintahan		
		1.2.07.40	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	1.Persentase Desa memiliki BUMDes		100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100%	80.000.000			
		40.10	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	1.Jumlah Desa Terfasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa		15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	16.000.000	15 Desa	80.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100		Baik Skala 0 -100				
		3.0.08.33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kecamatan		Baik Skala 0-100	55.200.000	Baik Skala 0-100	55.200.000	Baik Skala 0-100	55.200.000	Baik Skala 0-100	55.200.000	Baik Skala 0-100	82.800.000	Skala 0-100	303.600.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(PATEN)															
		33.09	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	1.Jumlah Perijinan/ Rekomendasi yang diterbitkan		5 Ijin / Rekomendasi	55.200.000	5 Ijin / Rekomendasi	55.200.000	5 Ijin / Rekomendasi	55.200.000	5 Ijin / Rekomendasi	55.200.000	5 Ijin / Rekomendasi	82.800.000	Ijin / Rekomendasi	303.600.000	Seksi Pelayanan Umum	

Tuban, 1 April 2019  
**CAMAT SEMANDING**

**Drs. DANARJI, MM.**  
NIP. 19651231 199303 1 080



## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016-2021, maka Indikator Kinerja Kecamatan Tahun 2016-2021 beserta targetnya adalah sebagaimana tabel 6.1. berikut :

**Indikator Kinerja OPD Yang Mangacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Ketentuan Perdagri dan Permendes	60	60	70	80	90	100	
	Persentase Lemabaga Masyarakat Desa Beradministrasi Baik (%)	60	60	70	80	90	100	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat		3	5	8	12	15	
5	Hasil Penilaian	C	CC	B	B	BB	A	

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah adalah merupakan bentuk rencana program kerja peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis dengan mengacu pada kajian dan analisis terhadap visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban untuk jangka waktu 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan sebagai OPD. Oleh karena itu substansi dan muatan Renstra OPD dibatasi hanya pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Dengan mempertimbangkan potensi, sarana dan prasarana serta kemampuan yang ada menjadi pendorong dalam mewujudkan sasaran sesuai program yang telah ditetapkan. Sudah barang tentu keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai dengan kerja sebagian pihak. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama serta peran aktif seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Semanding agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN SEMANDING  
TAHUN 2016-2021

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	Drs.Danarji, MM	Ketua	1.
2	Singgih Sunyoto, SH, M.Hum	Sekretaris	2.
3	Bambang Suhirmanto, S.ST	Kelompok Kerja	3.
4	Sujtipto, SH	Kelompok Kerja	4.
5	Tolikan, SE	Kelompok Kerja	5.
6	Suprpto, S.IP	Kelompok Kerja	6.
7	Aulia Asrifah, SP	Kelompok Kerja	7.

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah (Renstra OPD) Tahun 2016 – 2021 Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah (Renstra OPD) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ditetapkan untuk memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan sesuai visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut merupakan perwujudan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia, sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki acuan yang jelas.

Pada akhirnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) diharapkan dapat memberikan urutan skala prioritas pembangunan tahunan yang disusun dengan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah secara keseluruhan.

# **REVIEW RENSTRA KECAMATAN SEMANDING TAHUN 2016 – 2021**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TUBAN  
KECAMATAN SEMANDING  
2016-2021**

Jl. Hayam Wuruk No. 90-B ☎ (0356) 323738